



DPM BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Sampang memiliki posisi yang strategis, yaitu berada diantara Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan. Luas wilayah daratan Kabupaten Sampang mencapai 1.233,30 km² yang secara administrasi terbagi dalam 14 kecamatan, 6 kelurahan, 180 desa, 949 dusun, 1.074 Rukun Warga dan 2.281 Rukun Tetangga. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sampang sebagai berikut:

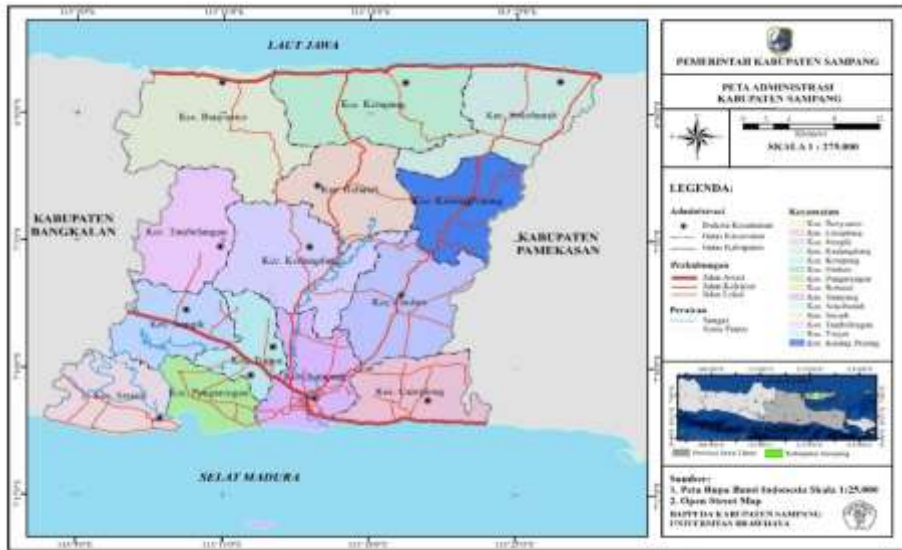
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan

2. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Sampang menjadi jalur distribusi utama karena letaknya yang berada di pusat pulau Madura. Kabupaten Sampang berada di antara 113°08' BT - 113°39' BT dan 06°05' LS - 07°13' LS. Kabupaten Sampang memiliki garis pantai yang panjang di sebelah utara dan selatan, yang sangat strategis untuk pengembangan industri kemaritiman. Selain itu, posisi Kabupaten Sampang berada di antara Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan memiliki nilai tambah dalam pendistribusian barang antar wilayah karena dilalui oleh jalan utama di Pulau Madura, sebagaimana yang digambarkan berikut:



Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sampang



Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang

3. Topografi

Pengembangan lahan pertanian cocok untuk dikembangkan dengan topografi Kabupaten Sampang yang cenderung datar dan bergelombang. Topografi yang datar cocok untuk ditanami padi atau sebagai lahan persawahan. Ketinggian permukaan wilayah Kabupaten Sampang berada diantara 0 – 300 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sampang merupakan kecamatan di Kabupaten Sampang dengan luas wilayah terbesar berkategori datar, yaitu sebesar 5.849 ha. seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Rincian Klasifikasi Kelerengn Tanah di Kabupaten Sampang

NO	KECAMATAN	KELERENGAN (Ha)			
		Datar (0-2%)	Bergelombang (>2-15 %)	Curam (>15-40%)	Sangat Curam (>40%)
1	Sreseh	2.721,00	4.474,00	-	-
2	Torjun	2.615,00	1.725,50	78,5	-
3	Pangarengan	2.595,63	1.674,37	-	-
4	Sampang	5.849,63	985,75	165,62	-
5	Camplong	5.099,00	1.866,00	28	-
6	Omben	3.530,93	5.308,92	2.739,80	51,35
7	Kedungdung	3.370,60	7.576,40	1.148,00	213
8	Jrengik	3.349,00	2.240,00	493	453
9	Tambelangan	3.411,50	4.565,00	708,5	321



NO	KECAMATAN	KELERENGAN (Ha)			
		Datar (0-2%)	Bergelombang (>2-15 %)	Curam (>15-40%)	Sangat Curam (>40%)
10	Banyuates	2.823,50	9.407,50	1.892,00	-
11	Robatal	301,5	7.364,50	398	-
12	Karangpenang	81,5	7.400,50	943	-
13	Ketapang	1.173,28	5.580,70	5.399,04	374,98
14	Sokobanah	863,57	7.638,00	1.253,47	1.085,96
Jumlah		37.785,64	64.807,14	15.246,93	2.490,29

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Sampang

Kelerengannya wilayah Kabupaten Sampang bervariasi antara datar, bergelombang, curam dan sangat curam dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kelerengannya 0-2% meliputi luas 37.785,64 Ha atau 31,40 persen dari luas wilayah keseluruhan kecuali daerah genangan air, pada wilayah ini sangat baik untuk pertanian tanaman semusim.
- Kelerengannya >2-15% meliputi luas 67.807,14 Ha atau 53,86 persen dari luas wilayah keseluruhan, baik sekali untuk usaha pertanian dengan tetap mempertahankan usaha pengawetan tanah dan air. Selain itu pada kemiringan ini cocok juga untuk konstruksi/ permukiman
- Kelerengannya >15-40% meliputi luas 15.246,93 Ha atau 12,67 persen dari luas wilayah keseluruhan. Daerah tersebut baik untuk pertanian tanaman keras/tahunan, karena daerah tersebut mudah terkena erosi dan kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini pun tidak cocok untuk konstruksi.
- Kelerengannya >40% meliputi luas 2.490,03 Ha atau 2,07 persen dari luas wilayah keseluruhan. Daerah ini termasuk kedalam kategori kemiringan yang sangat terjal (curam) dimana lahan pada kemiringan ini termasuk lahan konservasi karena sangat peka terhadap erosi, biasanya berbatu diatas permukaannya, memiliki run off yang tinggi serta kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini tidak cocok untuk konstruksi. Daerah ini harus merupakan daerah yang dihutankan agar dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.



4. Geologi

Pengembangan komoditas pertanian akan tergantung pada kesesuaian jenis tanah. Jenis tanah yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: bahan induk, batuan induk, curah hujan, bentuk wilayah, dan pengaruh kegiatan manusia. Sifat kimia dan sifat bahan induk sangat mempengaruhi unsur hara yang tersedia dalam tanah, akan mempengaruhi kesuburan dan produksi tanaman. Secara umum jenis tanah pada Kabupaten Sampang meliputi *alluvial*, *litosol*, *alluvial* kelabu kekuningan, kompleks mediteran-*gromosol-litosol*, *asosiasilitosol* dan mediteran coklat kemerahan, *grumosol* kelabu, kompleks mediteran merah dan *litosol*, kompleks *grumosol* kelabu dan *litosol* serta asosiasi hidromorf dan *planosol* coklat kekelabuan.

Tabel 2.2
Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Sampang

No	Jenis	Luas	
		Hektar	Persentase
1	Alfisol, Inseptisol	56.752,35	46,18
2	Entisol	20.814,85	16,94
3	Inseptisol	1.769,91	1,44
4	Mollisol	43.549,89	35,44
	JUMLAH	122.887,00	100

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Sampang bagian yang terluas adalah tanah dari jenis Alfisol, Inseptisol. Luas wilayah dengan jenis tersebut yakni 56.752,35 ha diikuti jenis tanah Entisol dengan luas 20.814,85 ha. Dengan sebagian besar jenis tanah tersebut maka tanaman padi, ubi kayu dan jagung sebagai tanaman pangan yang dikembangkan dan diproduksi sebagian besar masyarakat.

5. Hidrologi

Kabupaten Sampang memiliki potensi hidrologi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kabupaten Sampang memiliki 34 sungai yang dikelompokkan menjadi dua sub wilayah, yaitu:

- 1) Kabupaten Sampang Utara, terdapat 9 sungai, yaitu:



Sungai Pajajagan, Sungai Dempo Abang, Sungai Sumber Bira, Sungai Suwa'an, Sungai Sodung, Sungai Manding, Sungai Rabian, Sungai Brambang dan Sungai Sumber Lanjang, Sungai Nipa, Sungai Brumbung, Sungai Mandirah.

2) Kabupaten Sampang Selatan, terdapat 25 sungai, yaitu:

Sungai Pangetakan, Sungai Legung, Sungai Kalah, Sungai Tambak Batoh, Sungai Taddan, Sungai Gunong Maddah, Sungai Sampang, Sungai Kamuning, Sungai Madungan, Sungai Gelurang, Sungai Gulbung, Sungai Lampenang, Sungai Cangkrem, Sungai Bakung, Sungai Pangandingan, Sungai Cangkokon, Sungai Pangarengan, Sungai Kepang, Sungai Klampis, Sungai Dampol, Sungai Sumber Koneng, Sungai Kati, Sungai Pelut dan Sungai Jelgung.

Berdasarkan satuan wilayah penambangan daerah aliran sungai (SWP-DAS), Kabupaten Sampang terbagi atas 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi:

- 1) DAS Kemuning, dengan luas 48.556 Ha dan merupakan Prioritas penanganan lahan kritis. Aliran sungai kemuning berada di zona tengah dan secara administratif SWP-DAS Kemuning meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Robatal (bagian hulu), Omben, Kedungdung (bagian tengah), Sampang dan Camplong (bagian hilir).
- 2) DAS Nedung (Nepa-Sodung) dengan luas 37.142 ha berada di zona utara dan merupakan prioritas II penanganan lahan kritis. Secara administratif DAS Nedung meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sokobanah, Ketapang dan Banyuates.
- 3) DAS Blega, dengan luas 34.381 ha berada di zona barat dan merupakan prioritas III dalam penanganan lahan kritis. Secara administratif DAS Blega meliputi wilayah Kecamatan Tambelangan, Jrengik, Torjun, dan Sreseh dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Kedungdung.
- 4) DAS Samajid, dengan luas 1.522 ha berada di zona timur dan merupakan prioritas IV dalam penanganan lahan kritis. Secara Administratif DAS Samajid meliputi sebagian kecil Kecamatan Robatal, Omben, dan Camplong.



- 5) DAS Tambengan, dengan luas 700 ha dan secara administratif berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Banyuates bagian barat.
- 6) DAS Tamberu dengan luas 586 ha yang secara administratif berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokobanah bagian Timur.

6. Klimatologi

Kabupaten Sampang memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan merupakan waktu yang tepat untuk menanam berbagai tanaman pangan karena ketersediaan air yang cukup melimpah. Selain itu pada saat musim penghujan Kabupaten Sampang sangat rawan terhadap bencana banjir, curah hujan yang cukup tinggi di wilayah utara khususnya di kecamatan Kedungdung, Robatal dan Karang Penang hampir semua bermuara di kali Kamuning. Daya tampung kali kemuning yang semakin terbatas menyebabkan luapan air pada daerah sekitar wilayah sungai. Data curah hujan perbulan tahun 2015 di kabupaten Sampang sebagai berikut:

7. Penggunaan lahan

Tanah atau lahan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu tanah sawah dan non sawah. Penggunaan tanah sawah menurut jenis pengairannya terdiri dari sawah dengan pengairan teknis, sawah dengan pengairan setengah teknis, sawah dengan pengairan sederhana. Sedangkan tanah non-sawah terdiri dari perkarangan, tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebun/huma, padang rumput, tambak, dan kolam/tebat.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Sampang memiliki berbagai potensi meliputi fisik wilayah, sumberdaya alam, infrastruktur, dan wilayah rawan bencana. Berdasarkan potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Sampang memiliki beberapa potensi wilayah diantaranya:



1. Potensi Fisik wilayah

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Sampang merupakan potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan, dimana tinjauan akan potensi fisik dasar ini didasarkan atas kondisi topografi, jenis tanah, hidrologi, dan iklim dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketinggian wilayah yang dimiliki maka terdapat wilayah pantai yang cukup panjang di bagian utara dan selatan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi mata pencaharian penduduk yaitu nelayan serta sangat cocok juga untuk lokasi pengembangan industri maritim dan perdagangan serta untuk wisata pesisir.
- 2) Pada wilayah dengan ketinggian sedang akan cocok untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan, komoditi yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat antara lain tembakau, kedelai, jagung dan wijen.
- 3) Berdasarkan kesamaan jenis tanah dan hidrologi untuk wilayah Sampang bagian utara telah dikembangkan kawasan agropolitan meliputi kecamatan Banyuates, Ketapang dan Tambelangan dengan jenis komoditas hortikultura semangka, cabe jamu dan bantul.
- 4) Jenis tanah *alluvial* yang terdapat pada wilayah yang kebanyakan berada di sepanjang sungai dan dekat dengan muara, dimana jenis tanah ini merupakan endapan tanah liat pasir halus berwarna hitam kelabu dengan daya tanah air cukup baik. Jenis tanah tersebut sangat baik digunakan untuk areal penggarapan.
- 5) Jenis tanah mediteran merah dan litosol yang berasal dari bahan induk volkan intermedier dimana pada wilayah dengan jenis tanah tersebut merupakan wilayah batu kapur dan batu putih (dolomit) hingga oleh masyarakat setempat dibutuhkan sebagai wilayah penambangan.



2. Potensi Sumberdaya Alam

Kabupaten Sampang memiliki beragam potensi sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan pada setiap kecamatan. Potensi SDA tercermin atas komoditas yang paling dominan dari sektor-sektor yang berkembang pada masing-masing kecamatan sehingga mempermudah dalam pengembangan selanjutnya. Adapun potensi dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Sampang adalah seperti pada tabel berikut ini.



Tabel 2.3
Wilayah di Kabupaten Sampang

No	Kecamatan	Potensi					
		Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Pertanian	Pertambangan /Industri	Pariwisata
1	Sreseh	wijen, kapuk randu, kelapa, tembakau	bandeng, udang, kepiting	ayam buras, domba	Padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, mangga	Pasir laut	-
2	Torjun	tembakau, kelapa	bandeng, udang, kepiting, teri	kambing, ayam	Padi, pisang	Garam	-
3	Pangarengan	tembakau, kelapa	bandeng, udang, kepiting, teri	kambing, ayam	Padi, mangga	Garam	-
4	Sampang	tembakau, kelapa	bandeng, udang	kuda, ayam, kambing, domba	Padi, ubi kayu, mangga	batu kapur, batik	makam ratu ebu, goa lebar, sumber welirang, kerapan sapi
5	Camplong	tembakau, kelapa	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	sapi, kambing, ayam	Padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau	Dolomit, pasir laut	pantai camplong, sumber oto'
6	Omben	Tembakau, kelapa, siwalan, asem jamu, kunyit, temu ireng		sapi, kambing, ayam	Padi, jagung, ubi kayu, kacang hijau, bentul, mangga, jambu air	Dolomit	
7	Kedungdung	Tembakau, kelapa, kapuk randu		sapi, kambing, ayam, domba	Padi, ubi kayu, bentul, mangga, pisang	batu bintang	waduk klampis
8	Jrengik	Tembakau, kelapa, kapuk randu		sapi, kambing, ayam, domba	Padi, jagung, mangga	Batu kapur, batik	
9	Tambelangan	Kelapa, pandan, wijen		sapi, kambing, ayam	Padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, bentul, cabe rawit, mangga	batu kapur	
10	Banyuates	jambu mete, kelapa, pandan, cabe jamu	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	sapi, kambing, ayam, domba	Padi, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, bentul, mangga, pisang, semangka	batu kapur	hutan kera Nepa
11	Robatal	Tembakau, kapuk randu, serat nenas, kunyit, lempuyang		sapi, kambing, ayam	Ubi kayu, kedelai, bentul, cabe rawit, mangga, pisang	pengeboran minyak	
12	Karang Penang	Tembakau, kapuk randu, serat nenas, kunyit, lempuyang		sapi, kambing, ayam	Jagung, ubi kayu, kedelai, bentul, pisang	Tanah liat, genteng	
13	Ketapang	jambu mete, kapuk randu, asem jawa, cabe jamu, jarak, lengkuas	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	kambing, sapi, ayam, kuda	Jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, mangga, pisang	batik	air terjun Toroan
14	Sokobanah	Tembakau jambu mete, kapuk randu, asem jawa, lengkuas	cakalan, teri, cumi rajungan, kepiting	sapi, ayam, kuda	Jagung, ubi kayu, kedelai, cabe rawit, mangga, pisang	Dolomitb	

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018



3. Potensi Infrastruktur

Kabupaten Sampang memiliki potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui wilayah darat dan laut. Pada wilayah darat, aksesibilitas Kabupaten Sampang menuju Surabaya lebih mudah. Dengan adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan antaran pulau Jawa dan pulau Madura, perpindahan penduduk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi ataupun aktivitas lainnya dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Pengembangan wilayah laut juga dapat dilakukan melalui sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai jalur perdagangan ke luar daerah dalam memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh Kabupaten Sampang. Pada Selat Madura telah dibangun Pelabuhan Pengumpan Regional Taddan, jalur yang dihubungkan adalah Sampang – Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Pelabuhan lokal Tanglok merupakan pelabuhan untuk perdagangan, komoditas yang diperdagangkan dari Sampang berasal dari sektor perikanan, sedangkan dari Probolinggo yang diangkut adalah pasir hitam. Pada jalur laut Jawa yang dilayani adalah Sampang-Kalimantan, dimana komoditas dari Sampang berbasis perikanan dan tenaga kerja sedangkan dari Pulau Kalimantan yang diangkut adalah kayu hutan.

4. Wilayah Rawan Bencana

Bencana Alam Banjir dapat dipengaruhi oleh keadaan alam dan ulah campur tangan manusia. Keadaan alam yang dimaksud adalah kondisi dataran yang cukup landai dan dilalui oleh sungai-sungai sehingga ketika air laut pasang, sebagian daratan itu berada di bawah permukaan air laut. Disamping itu, banjir juga bisa terjadi karena curah hujan tinggi. Fenomena kenaikan paras muka air laut (*sea level rise*) juga menjadi penyebab meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Selain itu Bencana banjir terjadi akibat tingginya curah hujan, kondisi penampang sungai yang tidak mampu lagi menampung debit banjir, kondisi morfologi sungai yang berkelok-kelok, serta adanya penambahan kapasitas debit banjir melalui anak-anak Sungai



Kemuning, selain sistem drainasi yang kurang berfungsi dengan baik. Banjir di Kabupaten Sampang seringkali terjadi di Kecamatan Sampang yang menggenangi 3 kelurahan dan 3 desa.

Dalam mitigasi bencana banjir, salah satu upaya yang dilakukan adalah pada daerah hulu juga telah dilakukan penanaman vegetasi pada lahan-lahan kritis yang dapat menahan air hujan, pengerukan sungai atau normalisasi sungai. Normalisasi sungai bertujuan mengangkat sedimen yang tertampung di sungai, untuk menambah daya tampung atau volume air yang bisa tertampung di sungai. Selain itu adanya pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada oknum yang tak bertanggung jawab dalam usahanya untuk merubah kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Selanjutnya pembuatan embung dan reservoir sebagai bak penampung air biasanya ditempatkan didaerah perbukitan guna menahan aliran air dan menampung air agar tidak cepat mengalir ke daerah bagian bawah. Di samping itu juga berguna sebagai cadangan air di musim kemarau. Perbaikan saluran-saluran air serta saluran drainase perkotaan sangat berguna dalam mengatasi banjir. Hal ini dilakukan agar aliran air bisa lancar dan tidak tersendat atau tertahan di selokan yang mengakibatkan banjir.

Daerah yang rawan terhadap longsor di Kabupaten Sampang meliputi wilayah perbukitan karena memiliki kelerengan yang lebih tinggi dan sangat rentan terhadap longsor khususnya disekitar wilayah tengah Kabupaten Sampang. Sedangkan daerah kritis di Kabupaten Sampang meliputi lahan-lahan kering yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Lahan kritis tersebut merupakan areal yang tengah mengalami erosi dan harus segera ditangani. Penanganan lahan kritis ini tersebar di sepanjang DAS di Kabupaten Sampang. DAS tersebut antara lain DAS Nodung yang berada di Kecamatan Banyuates, Ketapang dan Sokobanah, DAS Kemuning yang berada di Kecamatan Robatal, Omben, Kedungdung, Sampang, dan Camplong, DAS Semajid yang berada di Kecamatan sebagian Kecamatan Robatal, Sokobanah, Omben, Camplong dan DAS Blega yang terdapat di Kecamatan



Tambelangan, Jrengik, Torjun, Kedungdung, Sreseh. Namun, ada beberapa prioritas penanganan erosi tersebut antara lain yang ada di Kecamatan Sampang, Omben, Kedungdung dan Robatal.

Wilayah pesisir selatan Kabupaten Sampang rawan terhadap abrasi laut adalah di wilayah Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sreseh. Adanya abrasi ini disebabkan karena rusaknya dan berkurangnya hutan mangrove yang menjadi barrier dari abrasi ini. Untuk meminimalisir adanya abrasi ini maka rehabilitasi dan reboisasi hutan mangrove sangat diperlukan. Sedangkan untuk wilayah pesisir utara, lebih rentan terhadap abrasi dikarenakan gelombang laut yang lebih besar dan tidak adanya mangrove di wilayah pesisir utara. Tidak adanya mangrove ini dikarenakan kondisi pesisir wilayah utara merupakan pantai berkarang sehingga mangrove sulit untuk tumbuh.

Gambar 2.2
Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi



Sumber: RTRW Kabupaten Sampang

2.1.1.3 Aspek Demografi

Penduduk memiliki peran ganda yaitu dapat berperan sebagai modal atau beban dalam pembangunan suatu daerah. Peran penduduk yang begitu strategis harus diberdayakan agar dapat menjadi modal

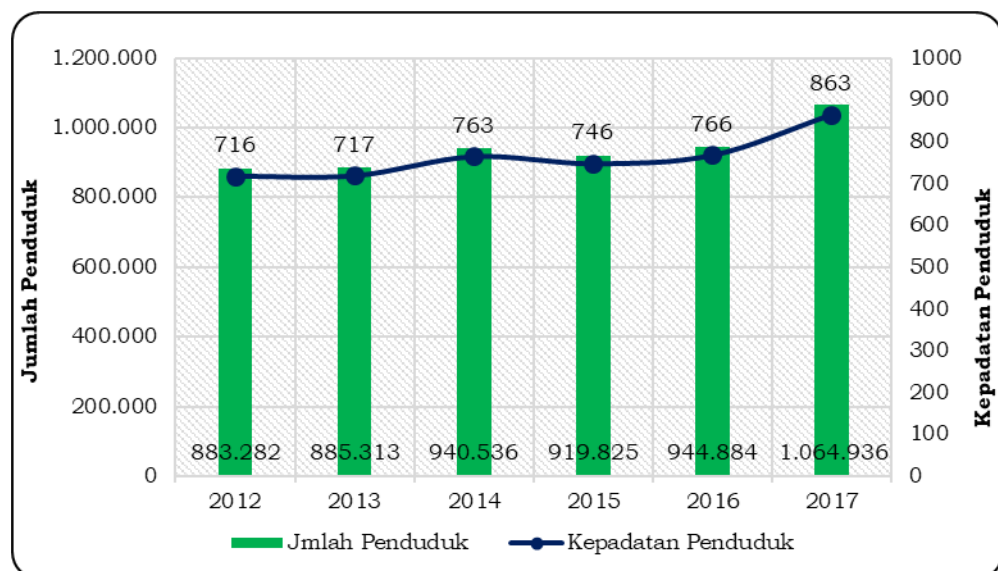


pembangunan. Bila penduduk memiliki kualitas diri yang tinggi (memiliki pendidikan tinggi atau ketrampilan) maka dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Sebaliknya bila kualitas penduduk rendah akan membebani atau menghambat perkembangan suatu daerah. Kondisi demografis penduduk Kabupaten Sampang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan luas wilayah ± 1.233,30 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2017 adalah 863 jiwa/km². Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 766 jiwa/km². Kepadatan ini menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun sejak 2012 hingga 2017. Perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.3
Kepadatan dan Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 – 2017



Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

Jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11,28 persen menjadi 1.064.936 jiwa



dari tahun 2016 sebanyak 944.884 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sampang sebanyak 128.120. Sebaliknya, Kecamatan Pangarengan menjadi wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil sebanyak 27.526 jiwa.

2. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Sampang lebih besar dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan *sex ratio* Kabupaten Sampang tahun 2017 adalah sebesar 101,66 persen. Artinya, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan 101,66 : 100. Maka bisa dikatakan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 101 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini baru terjadi apa tahun ini dalam lima tahun terakhir

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016 - 2017

No	Kecamatan	2016			2017		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sreseh	16,688	16,376	33,064	18.094	17.818	35.912
2	Torjun	21,437	20,871	42,308	23.192	22.790	45.982
3	Sampang	57,872	56,701	114,573	64.622	63.498	128.120
4	Camplong	37,967	36,892	74,859	43.198	42.246	85.444
5	Omben	47,774	45,877	93,651	52.736	51.173	103.909
6	Kedungdung	45,182	43,990	89,172	51.556	50.841	102.397
7	Jrengik	18,789	17,993	36,782	20.632	20.020	40.652
8	Tambelangan	29,179	27,695	56,874	32.034	30.773	62.807
9	Banyuates	37,403	37,528	74,931	44.180	44.817	88.997
10	Robatal	30,589	29,590	60,179	33.951	32.955	66.906
11	Sokobanah	37,161	36,985	74,146	42.574	42.212	84.786
12	Ketapang	41,228	41,113	82,341	47.526	47.836	95.362
13	Pangarengan	12,305	11,790	24,095	13.973	13.553	27.526
14	Karangpenang	44,505	43,404	87,909	48.596	47.540	96.136
	Jumlah	478,079	466,805	944,884	536.864	528.072	1.064.936

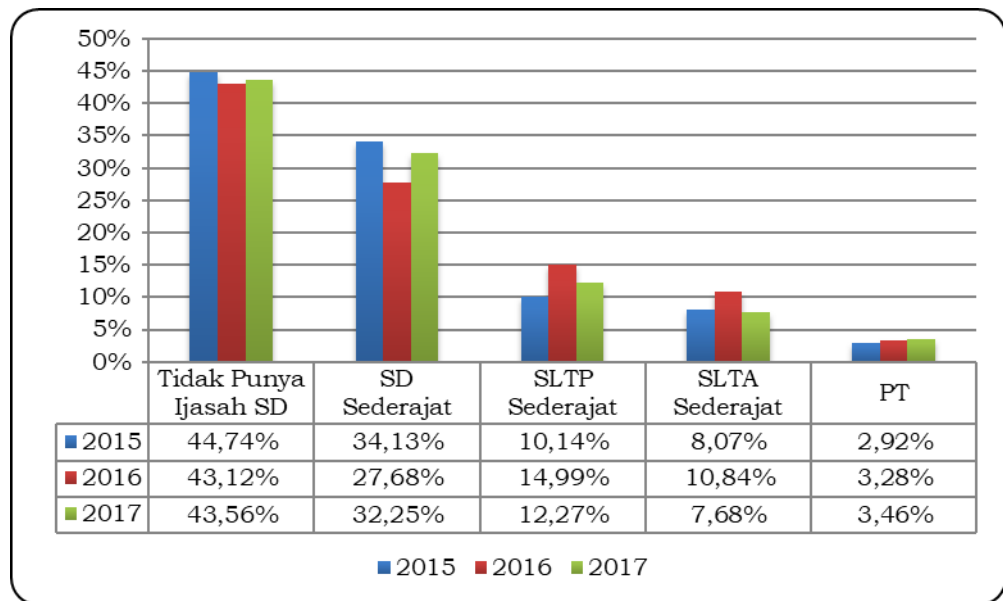
Sumber : LKPJ Kabupaten Sampang, 2017



3. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator kualitas penduduk adalah dengan melihat perkembangan tingkat pendidikan masyarakat. Sumber daya manusia yang unggul dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi modal berharga bagi kemajuan perekonomian. Pada tahun 2017 Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sampang mengalami penurunan. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang memenuhi standar minimal wajib belajar 9 tahun hanya menurun menjadi 12,27 persen dari tahun sebelumnya sebesar 14,99 persen dari total penduduk Kabupaten Sampang. Penduduk dengan pendidikan akhir SMA sederajat dan perguruan tinggi masing-masing hanya sebesar 7,68 dan 3,46 persen.

Gambar 2.4
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sampang



Sumber: LKPI Bupati Sampang Tahun 2015-2016-2017

Pada tahun 2017, pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas adalah tidak punya ijazah setingkat SD sebanyak 43,56 %, punya ijazah SD/Sederajat sebanyak 32,25 %, punya ijazah SLTP/Sederajat sebanyak 12,27 %, punya ijazah SLTA/Sederajat sebanyak 7,68 % dan tamat perguruan tinggi sebanyak 3,46%.



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi perekonomian Kabupaten Sampang dapat digambarkan melalui beberapa indikator, seperti produk domestik regional bruto maupun per kapita, struktur serta pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi suatu wilayah yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai pada tujuh belas sektor diantaranya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; keu Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Dari ketujuh belas sektor dalam PDRB, Sektor Pertanian, Kahutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar dalam menunjang besarnya PDRB Kabupaten Sampang. Sampai dengan tahun 2017, kontribusi sektor pertanian masih mendominasi dengan capaian lebih dari 30 persen pada setiap tahunnya. Tingginya kontribusi sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya disebabkan karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Sampang bekerja di sektor tersebut.

Tabel 2.5 PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.563.681,55	5.941.939,00
B	Pertambangan dan Penggalian	858.094,80	3.263.221,10
C	Industri Pengolahan	555.626,39	605.794,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.219,53	5.806,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.878,04	12.651,30



Kategori	Uraian	2016	2017
F	Konstruksi	1.462.999,57	1.603.143,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.758.317,23	3.083.694,70
H	Transportasi dan Pergudangan	155.845,87	172.730,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65.714,80	74.321,00
J	Informasi dan Komunikasi	707.769,82	779.358,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	216.847,26	242.253,90
L	Real Estate	212.518,26	224.517,40
M,N	Jasa Perusahaan	48.968,37	53.432,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	767.679,39	836.231,70
P	Jasa Pendidikan	499.712,54	548.012,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.760,60	95.021,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	154.141,08	165.152,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		14.132.775,10	17.707.283,20

Sumber : BPS Kabupaten Sampang, 2018 | Keterangan: * Angka Sementara

Tabel 2.6 PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.834.167,65	3.953.402,70
B	Pertambangan dan Penggalian	612.931,00	2.935.989,30
C	Industri Pengolahan	448.159,69	473.552,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.765,33	4.901,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.533,11	9.865,80
F	Konstruksi	1.062.078,50	1.127.183,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.099.345,39	2.242.022,60
H	Transportasi dan Pergudangan	121.384,13	129.514,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.258,24	54.507,90
J	Informasi dan Komunikasi	652.078,76	704.179,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161.820,18	172.356,00
L	Real Estate	168.944,71	704.179,90
M,N	Jasa Perusahaan	35.928,49	175.668,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565.972,92	592.630,20
P	Jasa Pendidikan	365.666,10	391.994,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.328,48	68.666,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	118.891,62	123.542,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		10.377.254,29	13.864.158,20

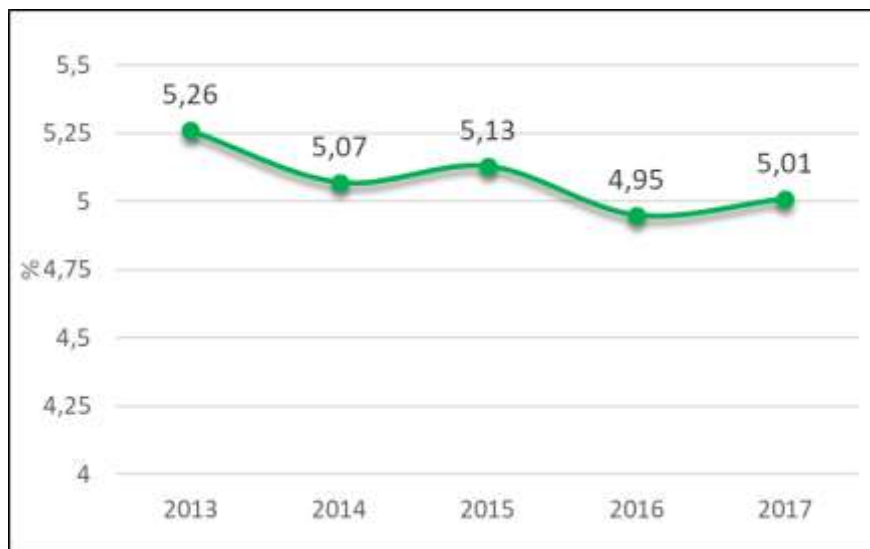
Sumber : BPS Kabupaten Sampang, 2018 | Keterangan: * Angka Sementara



2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode tahun 2010-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,01 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,95 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini banyak ditopang oleh kenaikan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini mengindikasikan perbaikan perekonomian masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Sampang, 2018

3. Pendapatan Perkapita

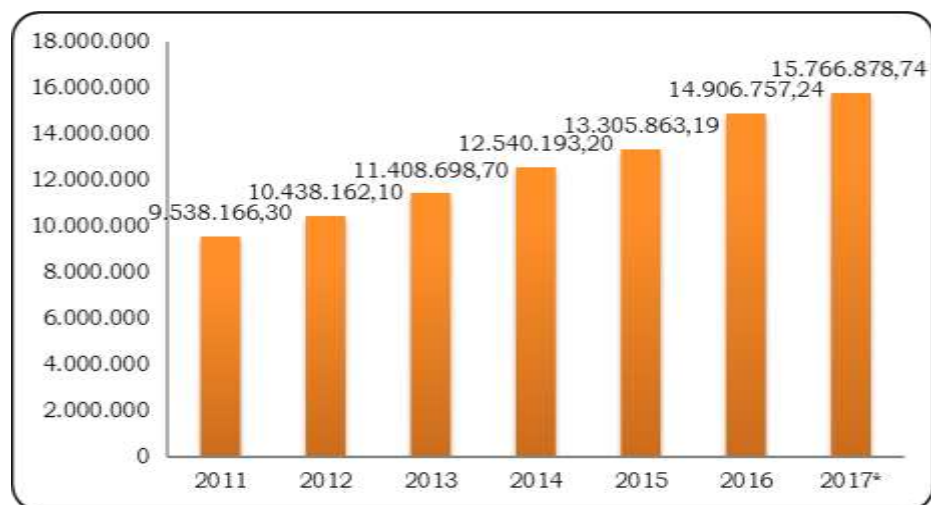
Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita merupakan Total Produk Domestik Regional Netto (PDRN) selama jangka satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita



Kabupaten Sampang pada tahun 2017 naik sebesar 5,77%, menjadi Rp.15,77 juta meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.14,91 juta. Peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Sampang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Rincian perkembangan pendapatan per kapita periode tahun 2011-2017 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.6
Pendapatan Per Kapita Kab. Sampang Tahun 2011 - 2017



Sumber: BPS Kab. Sampang dalam LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017
*) Angka sangat sementara

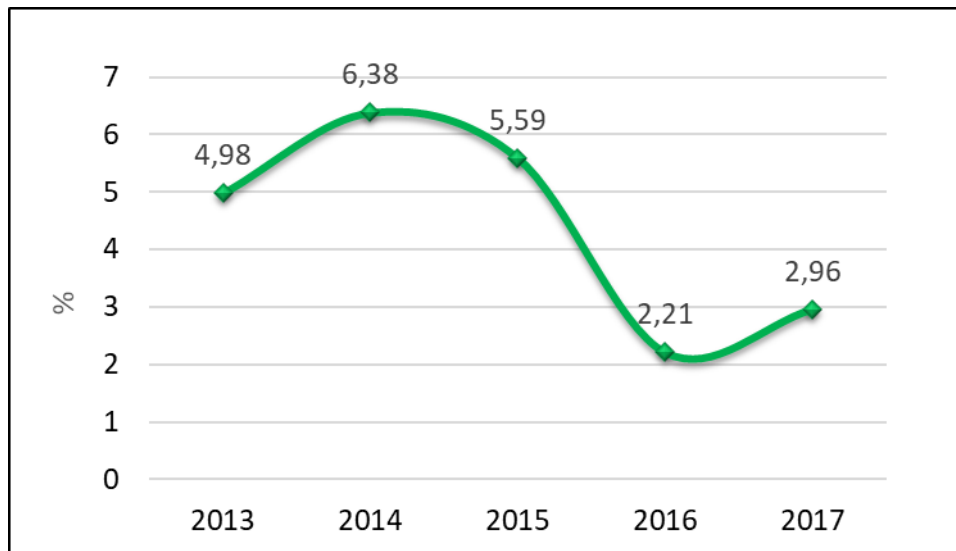
4. Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi. Inflasi merupakan suatu instrumen yang menunjukkan tingkat perkembangan harga secara umum, yang besarnya diperoleh dari perkembangan nilai indeks implisit, yaitu suatu indeks yang menggambarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Tingkat inflasi di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 sebesar 2,21 naik menjadi 2,96 pada tahun 2017.

Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Sampang pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.7
Inflasi Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017



Sumber: BPS Kabupaten Sampang, 2018

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

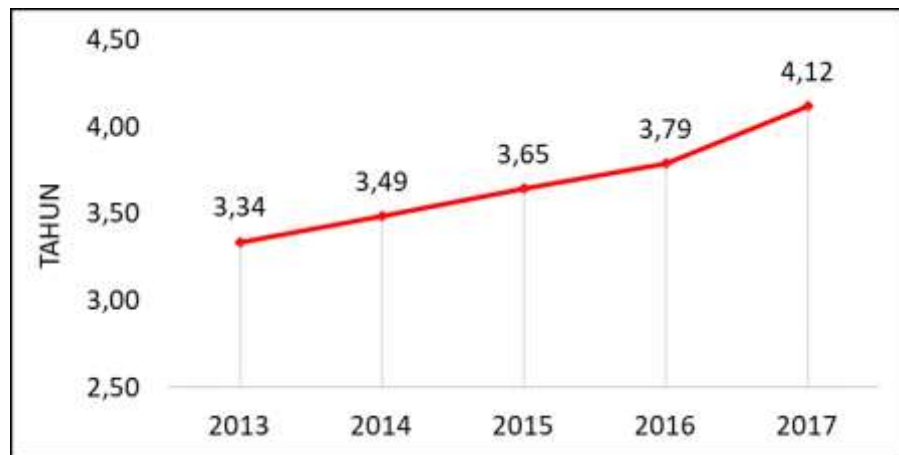
Fokus kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dengan memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat. Perkembangan masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2013, RLS di Kabupaten Sampang sebesar



3,34 tahun meningkat hingga mencapai 4,12 tahun pada Tahun 2017. Perkembangan RLS Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam gambar berikut:

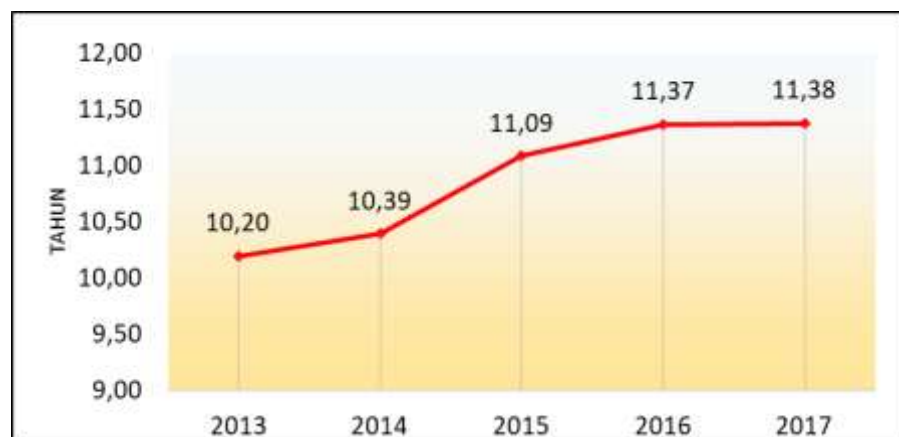
Gambar 2.8
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017



Sumber: Publikasi BPS, 2018

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS di Kabupaten Sampang juga menunjukkan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 2.9
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017



Sumber: Publikasi BPS, 2018



Indikator selanjutnya dalam mengukur tingkat kesejahteraan dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK SD/MI diperoleh dari jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikan SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK SMP/MTs/Paket B diperoleh dari jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APK SMA/SMK/MA/Paket C diperoleh dari jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK/ Paket C dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan tingkat APK untuk setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sampang sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017

APK	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A	%	112,08	114,18	112,46	115,39	112,11
SMP/MTs/Paket B	%	105,46	102,03	105,04	105,74	102,18
SMA/SMK/MA/Paket C	%	52,56	58,02	58,59	63,51	-

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang



pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Perkembangan APM Kabupaten Sampang selama kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan jenjang pendidikan ditunjukkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017

APM	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A	%	96,97	95,32	97,88	98,65	97,31
SMP/MTs/Paket B	%	80,04	76,80	77,21	81,72	73,86
SMA/SMK/MA/Paket C	%	40,41	39,25	41,46	44,48	-

Sumber: LKPJ Kabupaten Sampang, 2013 - 2017

2. Kesehatan

Tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, yaitu angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup. Peningkatan angka harapan hidup bisa dicapai apabila ada upaya untuk meminimalkan angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan. Rincian perkembangan indikator kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indikator Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 -2017

NO	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kematian bayi	(per 1000 Kelahiran hidup)	12,52	12,22	9,45	11,95	8,46
2	Angka kematian ibu	(per 100.000 kelahiran hidup)	110,63	106,28	82,20	84,51	86,4
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,46	67,48	67,58	67,62	67,67

Sumber : LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017 dan Publikasi BPS 2018



Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2017. Sampai dengan tahun 2017, capaian angka harapan hidup Kabupaten Sampang mencapai 67,67. Peningkatan angka harapan hidup diiringi dengan dengan penurunan angka kematian bayi. Angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 8,46 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menurun sebesar 3,49 (29,21%) dari tahun 2016. Walaupun angka kematian bayi sudah menurun dari tahun sebelumnya, namun masih adanya kematian bayi tersebut sebagian besar disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, dan persalinan oleh dukun. Sebaliknya, angka kematian ibu mengalami peningkatan 86,4 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu karena masih tingginya angka pre-eklamsia, keterlambatan rujukan, dan penyakit resiko tinggi. Hasil capaian AKI tahun 2017 ini telah memenuhi target SDG's 2017 yaitu sebesar 90 per 100.000 Kelahiran Hidup namun masih belum memenuhi target 2017 sebesar 82 per 100.000 Kelahiran Hidup.

3. Kesempatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada tahun 2017. Tingkat partisipasi kerja meningkat 4,56 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya meningkatnya pada TPAK adalah seiring dengan kualitas peningkatan Layanan pemberian pendidikan dan pelatihan baik oleh sektor formal maupun sektor pemerintah sendiri hal tersebut tercermin dari upaya bagian bidang ketenaga kerja dalam memberikan pelatihan dari start pemula sampai dengan bisanya peserta didik pelatihan untuk mengaplikasikannya dalam terpenuhinya kesempatan memperoleh pekerjaan. Upaya tersebut dengan banyaknya dilakukan pelatihan pelatihan di BLK Kabupaten Sampang sampai dengan berhari hari dengan target sampai bisa dan menjadi bekal untuk berpenghidupan atau bisa bekerja. Secara rinci, perkembangan TPAK dan persentase penduduk miskin adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10
Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Penduduk Miskin

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72,37	76,85	68,37	64,48	69,04
2	Persentase penduduk miskin	%	27,08	25,80	25,69	24,11	23,56

Sumber: Publikasi BPS, 2018

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang mengalami penurunan hingga berada pada angka 23,56 persen pada tahun 2017. Dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang diperlukan upaya yang intensif dan terintegrasi antar program untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Kabupaten Sampang sejumlah 28 urusan yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Perkembangan dari indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Urusan pendidikan di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Rincian perkembangan indikator kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.11
Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Program Pendidikan Anak Usia Dini						
APK PAUD	%	77,75	80,03	85,23	84,26	83,05
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	112,08	114,18	112,46	115,39	112,11
Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B	%	105,46	102,03	105,04	105,74	102,18
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A	%	96,97	95,32	97,88	98,65	97,31
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,04	76,8	77,21.00	81,72	73,86
Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	99,79	99,95	99,97	99,41	99,97
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	98,76	97,62	98,11.00	99,82	98,11
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI/Paket A	%	110,37	105,63	99	96	99
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs/Paket B	%	136,14	124,82	115	108	112
Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A	%	11,23	11	11,09	17	13,66
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Pkt B	%	11,13	8	10,09	11	12,72
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	56,31	55,94	83,36.00	75,7	64,79
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	71,07	67,78	87,39	91,167	85,61
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,37	0,5	0,45	0,63	0,12
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,78	0,92	0,89	0,72	0,49
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	93,47	94,01	97,62	98,03	99,51
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,68	96,32	97,15	99,24	97,76
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,15	92,84	95,69	90,91	93,92
Program Pendidikan Non Formal						
Angka melek huruf	%	87,01	89,76	91,72	92,11	91,73

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan menunjukkan ada peningkatan pada beberapa indikator, namun pada beberapa indikator lainnya memerlukan perhatian lebih. Beberapa indikator yang



mengalami peningkatan capaian kerja pada tahun 2017, yaitu: Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A, Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B, Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dan Angka Melek Huruf. Adapun beberapa indikator yang memerlukan upaya lebih untuk ditingkatkan antara lain APK PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI/Paket A, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs/Paket B, Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Pkt B, Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dan Angka melek huruf.

2. Kesehatan

Sampai dengan tahun 2017, kinerja urusan Kesehatan menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan persentase Balita Gizi Buruk; meningkatnya CNR seluruh kasus TB; menurunnya prevalensi kusta, Incidence Rate DBD, dan prevalensi hipertensi; meningkatnya persentase puskesmas terakreditasi, dan meningkatnya persentase masyarakat yang menjadi peserta JKN. Indikator kinerja urusan Kesehatan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.12
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Usia Harapan Hidup	tahun	65	66,57	67,51	67,59	67,67
Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 kelahiran	110,63	106,28	82,20	84,51	86,4,



Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	hidup					
Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	12,52	12,22	9,45	11,95	8,46
Persentase Balita Gizi Buruk	%	5,7	4,3	6,07	6,3	1,2
Angka Kesakitan PM dan PTM:						
- CNR Seluruh Kasus TB	per 100.000 penduduk	100,09	109,04	113,26	114,29	116,38
- Prevalansi Kusta	per 10.000 penduduk	4,14	5,15	5	3,47	3,16
- Incidence Rate DBD	per 100.000 penduduk	56,04	22,48	68	69,97	16,18
- Prevalansi Hipertensi	%	N/A	9,95	8,27	5,48	2,64
- Prevalansi Diabetes Melitus	%	N/A	N/A	0,34	0,33	0,63
Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	0	9,52	33,33	47,62	76,19
Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN	%	N/A	60	65	73	71,99

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2017

Dari keseluruhan indikator kinerja pada urusan kesehatan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perbaikan. Indikator tersebut meliputi Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN. Perkembangan kedua indikator tersebut menunjukkan ada perbaikan sampai dengan tahun 2016, namun kinerjanya mengalami kemnduran pada Tahun 2017.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa Indikator kinerja pada Urusan Pekerjaan Umum menunjukkan peningkatan pada tahun 2017. Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 64,98 persen pada tahun 2016 menjadi 75,24 persen pada tahun 2017. Hal serupa juga ditunjukkan oleh persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dimana pada Tahun 2016 sebesar 76,42 persen menjadi 85,87 persen pada tahun 2017. Akan tetapi, hal ini tidak diikuti dengan luas genangan banjir yang relatif tetap selama dua tahun terakhir yaitu 30,3 ha pada tahun 2016 dan 30,11 ha. Begitu pula rasio jaringan irigasi dan



persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik, nilainya relatif tetap pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya memperatahkan panjang jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Sampang menunjukkan kinerja yang stabil. Hal tersebut diindikasikan tindakan awal terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang juga sudah terlaksana 100 persen. Disamping itu, dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah juga sudah tersedia, namun demikian penjabaran dokumen RTRW kedalam RDTRK yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah belum terealisasi.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan perkembangan indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Infrastruktur Daerah dalam Kondisi Baik	%	51,95	61,82	64,01	64,98	75,24
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	77,12	79,17	74,49	76,42	85,87
Rasio Jaringan Irigasi		5,63	5,63	5,63	5,63	5,68
Persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	36,42	52,8	53,53	53,58	53,62
Luas genangan banjir	Ha	57,61	48,01	37,66	30,3	30,11
Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase pemanfaatan kawasan sesuai dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
Persentase Dokumen RDTRK yang ditetapkan dengan perda	%	0	0	0	0	0
Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan RDTRK	%	100	100	100	100	100
Persentase pelanggaran RDTRK yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2017



Sebagai informasi tambahan, berikut adalah beberapa data tentang kondisi jalan dan jembatan kabupaten di Kabupaten Sampang. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu 76,42 persen (850,262 km) pada tahun 2016 menjadi 78,16 persen (869,691 km) pada tahun 2017. Sedangkan kondisi jembatan kabupaten mengalami penurunan dari 100 persen pada tahun 2016 menjadi 94 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.14
Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sampang

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Jalan Kabupaten	582,800	582,800	582,800	1.112,636	1.112,636
	- Kondisi Baik (km)	449,444	461,386	472,563	850,262	869,691
	- Kondisi Rusak Ringan (km)	N/A	90,586	85,748	204,115	188,796
	- Kondisi Rusak Berat (km)	N/A	30,828	24,489	58,259	54,149
	- Jalan Kabupaten yang baik (%)	77,12	79,17	81,08	76,42	78,16
B.	Jembatan Kabupaten (buah)	109	109	109	156	156
	- Kondisi Baik (buah)	109	109	109	144	146
	- Kondisi Rusak (buah)	0	0	0	12	10
	- Jembatan Kabupaten yang baik (%)	100	100	100	92	94

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Secara umum, kualitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Sampang menunjukkan kondisi yang semakin baik dan layak huni. Hal tersebut diindikasikan oleh meningkatnya cakupan perumahan sehat yang didukung psu, persentase rumah layak huni, persentase rumah tangga berakses air minum, persentase rumah tangga berakses sanitasi; serta menurunnya Persentase permukiman kumuh sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:



Tabel 2.15
Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan perumahan sehat yang didukung PSU	%	-	12,47	12,47	14,55	16,00
Persentase permukiman kumuh	%	17,48	17,43	17,28	17,28	16,34
Persentase rumah layak huni	%	47,61	47,67	47,67	47,67	47,68
Persentase rumah tangga berakses air minum	%	26,8	30,1	31,84	33,00	33,70
Persentase rumah tangga berakses sanitasi	%	47,80	49,28	57,28	57,35	57,88

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2012 – 2017

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Satpol PP. Beberapa Indikator kinerja menunjukkan perkembangan yang baik pada kondisi 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) dan persentase penanganan bahaya bencana kebakaran. Akan tetapi ada indikator yang memerlukan perhatian khusus seperti semakin meningkatnya angka kriminalitas. Peningkatan jumlah kriminalitas disebabkan semakin meningkatnya kasus narkoba yang disebabkan oleh semakin meluasnya peredaran narkoba di masyarakat sehingga perlu penanganan khusus yang harus dilakukan Pemerintah. Perkembangan indikator kinerja Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kriminalitas	kejadian	298	284	339	349	416
Persentase Cakupan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Sampang	%	75	100	71	79	80,68



Jumlah pelanggaran perda	Pelanggaran	10	18	11	8	8
Persentase penanganan Bahaya Bencana Kebakaran	%	51,00	82,00	89,78	92,58	93,18

6. Sosial

Beberapa kinerja penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya Jumlah PMKS dan meningkatnya Jumlah PMKS yang tertangani. Akan tetapi ada beberapa indikator yang memerlukan perhatian seperti menurunnya persentase PMKS yang mendapat layanan program pemberdayaan, menurunnya persentase cakupan PMKS yang mendapat sistem perlindungan dan bantuan sosial. Adapun jumlah panti rehabilitasi sosial yang dibina mengalami penurunan karena banyak panti yang tidak memenuhi syarat disebabkan surat izinnya tidak diperpanjang.

Tabel 2.17
Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sampang

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS	Orang	87.526	87.483	87.108	86.633	83.963
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	352	397	660	11.055	11.286
Persentase PMKS yang mendapat layanan program pemberdayaan	%	0,4	0,45	0,76	12,76	7,19
Persentase cakupan PMKS yang mendapat sistem perlindungan dan bantuan sosial	%	0,4	0,45	0,76	12,76	9,82
Jumlah panti rehabilitasi sosial yang dibina	Panti	69	46	38	50	37

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

7. Tenaga Kerja

Secara umum, kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan sebesar 58,60 persen. Rasio ketergantungan meningkat menjadi 38,23 persen. Rasio Lulusan S1/S2/S3 menurun menjadi 3,4 persen. Realisasi ini tidak mencapai target karena kapasitas untuk melanjutkan ke jenjang lebih



tinggi terkendala oleh biaya ekonomi keluarga yang tidak mampu, sisi lain program beasiswa tidak banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat khususnya daerah pedesaan. Indikator lain yang perlu perbaikan, yaitu Persentase Partisipasi Angkatan Kerja yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72,37	76,85	68,37	64,48	69,04
Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	22,77	54,51	4,61	22,51	58,60
Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	6,12	8,72	4,48	7,60	3,4
Rasio Ketergantungan	%	33,35	30,86	33,32	32,58	38,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,68	2,22	2,51	2,77	2,48

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017 dan Publikasi BPS 2018

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum, kinerja dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kondisi yang semakin baik. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan tiga dari lima indikator yang ada. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT dan Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mampu pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Adapun partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan pembangunan juga menunjukkan peningkatan dari 49,89 persen pada tahun 2016 menjadi 50,18 persen pada tahun 2017. Peningkatan ini mengindikasikan bentuk keberhasilan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas



Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.	%	73,3	100	100	100	100
Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mampu pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	12	33,33	100	75	100
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan pembangunan	%	66,20	69,26	52,90	49,89	50,18
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	33,8	30,74	47,09	50,11	N/A
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	56,24	73,43	73,97	48,9	N/A

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2016

9. Pangan

Secara umum, kinerja dalam urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sampang menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan Angka Konsumsi Buah Tangga dari Rp. 21,93 juta per kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi Rp. 23,72 juta per kapita/tahun pada tahun 2017. Jumlah penanganan Daerah Rawan Pangan juga menunjukkan peningkatan dari 79 desa pada tahun 2016 menjadi 91 desa pada tahun 2017. Namun demikian Jumlah desa rawan pangan tercatat masih tetap sebanyak 33 desa. Urusan Pangan di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.20
Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	N/A	N/A	N/A	33	33
Angka Konsumsi RT per kapita/tahun (Juta Rp)	Juta Rp	15,08	17,01	20	21,93	23,72
Jumlah penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	Desa	44	69	61	79	91

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017



10. Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Sampang menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam hal mensertifikasi tanah pemda. Pada tahun 2016, persentase tanah pemda yang mengalami peningkatan menjadi 54,92 persen. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat sampai tahun 2016 sebanyak 675 bidang dibagi dengan jumlah bidang tanah pemda sebanyak 1.229 bidang tanah yang telah bersertifikat merupakan aset daerah yang nantinya dapat diperuntukkan sebagaimana mestinya tanpa terkendala permasalahan hukum dikemudian hari. Penyelenggaraan urusan Pertanahan di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Perkembangan kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	58,33	0	0	0	N/A
Persentase Tanah Pemda yang Bersertifikat	%	51,26	52,07	53,62	54,92	N/A

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

11. Lingkungan Hidup

Perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang semakin meningkat dari 51,46 pada tahun 2016 menjadi 51,70 pada tahun 2017. Hal ini ditopang oleh meningkatnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah penghargaan lingkungan hidup yang seelumnya sebanyak 11 penghargaan menjadi 13 pada tahun 2016 menjadi 13 pada tahun 2017. Luas lahan kritis juga berhasil ditekan dari 40,418 ha pada tahun 2016 menjadi 35,818 ha pada tahun 2017. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga mengalami peningkatan dari 32 persen pada tahun 2016 menjadi 33,33 persen pada tahun 2017. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di



Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.22
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
IKLH	-			51,12	51,46	51,70
Indeks Kualitas Air	-	-	-	43,3	43,50	43,52
Indeks Kualitas Udara	-	-	-	76,90	77,40	77,67
Indeks Tutupan Lahan	-	-	-	37,65	37,97	38,69
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	-	-	7	11	13
Luas lahan kritis	ha	41,377	41,107	40,722	40,418	35,818
Ruang terbuka hijau	%	29,93	30,37	32,00	32,00	33,33

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Padat beberapa indikator, kinerja dalam urusan kependudukan dan catatan sipil menunjukkan perlunya upaya perbaikan untuk tahun mendatang. Hal tersebut diindikasikan oleh menurunnya kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2017. Hal ini terlihat pada rasio penduduk ber-KTP dengan dengan capaian sebesar 78,57 persen pada tahun 2017. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum memiliki e-KTP disebabkan oleh penduduk wajib KTP masih banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP karena jauhnya lokasi tempat tinggal dari Kecamatan. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan perekaman e-KTP dengan layanan mobil keliling sehingga dapat menjangkau ke pelosok Desa di semua Kecamatan serta dilaksanakan sosialisasi penyuluhan administrasi kependudukan. Perkembangan kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Sampang, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	92,48	63,81	77,20	81,98	78,57
Rasio Keluarga ber Kartu Keluarga	%	90,71	97,99	83,60	100	100



Rasio bayi ber-akte kelahiran	%	10,56	34,29	44,49	85,55	72,24
Rasio ber akte kematian	%	0,13	1,38	10,96	22,68	10,57
Ketersesuaian database kependudukan skala nasional	%	80	80	80	86,4	85,24

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013– 2017

Sama halnya dengan rasio penduduk ber KTP, rasio Keluarga ber Kartu Keluarga telah mencapai 100 persen pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio ber akte kematian dan Ketersesuaian database kependudukan skala nasional memiliki nilai masing-masing pada tahun 2017 sebesar 72,24; 10,57; dan 85,24 persen. Masih adanya ketidaksesuaian data antara database pusat dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang disebabkan oleh: Masih ditemukan data ganda; Banyak warga yang melakukan perekaman KTP-el lebih dari satu kali sehingga terjadi data duplicate (ganda); Pindah alamat tidak lapor ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi meng-entry lagi pada SIAK dan Banyak warga yang tidak melaporkan kematian.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum, kinerja dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sampang menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Hal tersebut diindikasikan oleh stabilnya semua indikator. Indikator Jumlah LPM berprestasi masih tetap sebanyak 1 LPM. Upaya meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terus dilakukan dengan mengirimkan perwakilan perwakilan LPM dalam berbagai Lomba-lomba Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur. Indikator Persentase desa dengan PADesa di atas 30% APBDesa sudah ada 28% dari seluruh desa di Kabupaten Sampang. Adapun Indikator penyelesaian permasalahan desa mencapai 100%. Permasalahan yang muncul dan sudah diatasi di desa pada tahun 2017 secara umum disebabkan oleh adanya perubahan regulasi yang



mengatur tentang desa. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LPM berprestasi (kelompok)	LPM	n/a	n/a	1	1	1
Persentase desa dengan PADesa di atas 30 % APBDesa	%	n/a	n/a	25	27,78	28
Penyelesaian permasalahan Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013– 2017

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Keluarga Berencana di Kabupaten Sampang masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan rendahnya cakupan pelayanan KB Baru sebesar 13,37 persen, meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak sudah cukup baik. Selain itu, cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) sebesar 13,29 persen disebabkan masih tingginya penggunaan metode KB tradisional (Kalender berkala, pijat, jamu dll) oleh masyarakat yang tidak dilaporkan karena tidak termasuk dalam metode kontrasepsi yang disediakan, disamping masih adanya anggapan dalam masyarakat yang mengharamkan metode kontrasepsi tertentu seperti metode kontrasepsi medis operasi wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP). Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.25
Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Akseptor KB (baru)	%	17,01	12,93	12,46	13,37	N/A
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	11,19	10,79	10,56	13,29	N/A
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	99,59	85,57	79,69	81,75	N/A
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	%	73,38	73,17	73,78	72,58	75,72
Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	5,69	9,10	12,05	5,58	9,40

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB mengalami peningkatan meskipun belum optimal dengan realisasi 81,75 persen. Hal ini semua anggota kelompok Bina Keluarga Balita mendapatkan informasi dan edukasi tentang KB. Penurunan cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 75,72 persen. Hal ini disebabkan belum optimalnya capaian peserta KB aktif karena untuk meningkatkan prevalensi KB aktif dibutuhkan kesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang lebih tinggi seperti Implant, IUD, MOW dan MOP dibandingkan Metode kontrasepsi NON MKJP seperti PiL, Suntik, dan Kondom. Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 yang semakin meningkat dari 5,58 persen pada tahun 2016 menjadi 9,40 persen pada tahun 2017 mengindikasikan semakin banyaknya pasangan yang menikah pada usia terlalu muda dan hal ini perlu menjadi perhatian Kabupaten Sampang.

15. Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Sampang secara umum menunjukkan kondisi yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari fasilitas perlengkapan jalan yang mengalami peningkatan pada tahun 2017, menjadi 12.865 unit, dimana sebelumnya sejumlah 12.262 unit. Kedua hal tersebut menunjukkan semakin membaiknya kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk sub terminal dan pelabuhan jumlahnya tetap. Urusan perhubungan di Kabupaten Sampang



dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan :						
i - Sub Terminal	Unit	1	1	1	1	1
ii - Fasilitas perlengkapan jalan	Unit	7.570	8.936	10.165	12.262	12.865
b. Tersedianya Dokumen Tataran Transportasi Lokal	dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Pelabuhan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

16. Komunikasi dan Informatika

Secara umum, kinerja urusan komunikasi dan informatika yang relatif stabil dan menunjukkan kemajuan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah sistem informasi manajemen yang terintegrasi dari 19 pada tahun 2016 menjadi 30 pada tahun 2017. Jumlah Media Informasi Milik Pemda tetap sebanyak 5 media. Website Perangkat Daerah yang aktif menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 46 unit pada tahun 2016 menjadi 63 unit pada tahun 2017. Pengunjung website unit-unit pemerintah Kabupaten Sampang juga menunjukkan peningkatan yaitu mencapai 200.405 orang pada tahun 2017. Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi	unit	7	13	18	19	30
Jumlah Media Informasi Milik Pemda dan Non Pemda	media	4 dan 48	4 dan 55	4 dan 57	5 dan 60	5 dan 29
Website Perangkat Daerah yang aktif	unit	33	33	33	46	63
Pengunjung website unit-unit pemerintah daerah	Orang	99.183	98.703	100.897	115.542	200.405

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017



17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara umum, kinerja dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan peningkatan. Menurunnya jumlah koperasi yang aktif dikarenakan adanya peraturan baru berdasarkan Permen Koperasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil bahwa Koperasi dikatakan aktif tidak hanya berdasarkan keaktifan usaha saja tapi juga keberadaan pengurus dan anggota, melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan pada tahun 2015 ketentuan tiga kriteria tersebut belum berlaku. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Koperasi aktif	Koperasi aktif	389	395	400	247	214
	Koperasi	439	449	442	446	448
	%	88,61	87,97	90,50	55,38	47,77
Jumlah UMKM non BPR LKM UMKM (UMKM aktif)	UMKM	26.880	27.130	27.410	27.660	29.731
Jumlah BPR / LKM (BPR/LKM aktif)	LKM/BPR aktif	6	8	10	10	10

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

Peningkatan indikator kinerja juga terdapat pada jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM aktif sebesar 27.660. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan ekonomi melalui pelatihan kepada wirausaha baru, pelatihan Kerajinan miniatur Perahu Layar, Bintek ritel koperasi, Pelatihan pengembangan ekonomi lokal, pengembangan promosi produk usaha mikro kecil menengah dan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi dan UMKM. Kemudian, pada tahun 2016 telah dilaksanakan Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan sentra dan dihasilkan kesiapan LKM sebanyak 10 koperasi yang tidak mengalami perubahan.



18. Penanaman Modal

Secara umum, kinerja dalam urusan penanaman modal di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional baik PMA atau PMDN yang berjumlah 302 orang pada tahun 2016, dimana sebelumnya 97 orang pada tahun 2015. Disamping itu, peningkatan nilai realisasi PMDN pada tahun 2016 mencapai 380 milyar rupiah atau meningkat 129 persen disbanding tahun 2015. Sebaliknya penurunan penyelesaian ijin lokasi pada tahun 2016 yang menjadi 3 buah. Penyelesaian Ijin lokasi pada tahun 2016 mengalami penurunan di banding pada tahun 2015 dikarenakan jumlah pemohon hanya sebanyak 3 buah ijin lokasi. Berkurangnya jumlah pemohon karena adanya penyederhanaan perijinan sesuai dengan Disamping itu ada jenis pelayanan ijin lokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Ijin Pemanfaatan Ruang. Urusan penanaman modal di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	orang	82	83	97	302	507
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam juta rupiah	Rp	120.920	150.825	169.118	380.107	338.577
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)	Rp	5.758	14.939	18.293	210.989	(41.530)
Penyelesaian Ijin Lokasi	buah	7	3	4	3	0
Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan	%	59,95	59,51	65.20	83,43	N/A

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja dalam urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan pada dua indikator kinerja. Salah



satunya indikator jumlah gelanggang/gedung olahraga dan jumlah lapangan olahraga juga mengalami peningkatan, menjadi 7 gedung pada tahun 2016. Adapun, jumlah klub olahraga pada tahun 2016 sebanyak 2.286 klub mengalami penurunan menjadi 2.250 klub pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh klub yang sebelumnya kurang aktif menggabungkan diri pada klub olahraga yang lebih besar. Perkembangan organisasi pemuda pada tahun 2017 menunjukkan angka statis dari tahun 2013-2017. Kondisi statis tersebut dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi pemuda dalam keorganisasian Pemuda. Perkembangan capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	20	20	20	20	20
2	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk)	Klub	6.046	1.662	1.7068	2.286	2.250
3	Jumlah Gelanggang/gedung Olahraga (Selain Milik swasta)	Gedung	4	5	6	7	0,0950*
4	Jumlah lapangan olahraga	Lapangan	1	1	1	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017; * per 10.000 penduduk

20. Statistik

Perkembangan urusan statistik tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 hingga 2016. Jenis Dokumen Statistik yang disusun pada tahun 2015 terdiri dari Buku Tinjauan Ekonomi Makro, Executive Summary SUSENAS Kabupaten Sampang, Kompilasi Data Kabupaten, Kompilasi Data Kecamatan Tahun 2015. Urusan statistik di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan BPS Kabupaten Sampang. Badan ini bertugas melakukan proses pengumpulan, penyusunan, publikasi dan analisa terkait data kuantitatif yang ada di Kabupaten Sampang. Perkembangan kinerja urusan statistik di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:



Tabel 2.31
Indikator Kinerja Urusan Statistik

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jenis dokumen statistik yang disusun (Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan PDRB Kabupaten)	Dok	3	4	4	4	4

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2016

21. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 semakin menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah grup kesenian (per 10.000 penduduk) pada tahun 2016 mencapai 0,687. Peningkatan ini tidak terlepas dari karena antusias masyarakat yang besar untuk ikut serta dalam kegiatan budaya yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Jumlah benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2016 dan 2017 tetap 88 situs. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penambahan 3 situs yaitu Bujuk Napo Omben, Bujuk Terap Ketapang dan Monumen Situs Camplong. Kemudian, jumlah kesenian tradisional khas Sampang yang dilestarikan sebanyak 13 jenis kesenian, dimana terdapat 4 kesenian tambahan yaitu Kesenian Tonil Misri, Tradisi Pernikahan Tanang Lanjeng, Tradisi Mokka Bleber, dan Kesenian Lawak Mosa. Urusan kebudayaan di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah grup kesenian (per 10.000 penduduk)	Buah	0,531	0,531	0,587	0,687	N/A
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	75	83	85	88	88
Jumlah kesenian tradisional khas Sampang yang dilestarikan	Buah	3	5	7	11	13

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017



22. Kearsipan dan Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus). Perkembangan kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Perangkat daerah yang dokumennya tersampaikan	%	100	100	100	100	100
Jumlah arsip yang dikelola secara baku	Perangkat Daerah (Instansi)	40	52	52	52	52

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

Kinerja dalam pengelolaan arsip daerah di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 telah mencapai target yang ditentukan. Pengelolaan kearsipan daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah mencapai 100 persen. Hal tersebut karena semua Perangkat Daerah sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan semua Perangkat Daerah telah melaksanakan pengarsipan atas dokumen penting yang dimiliki. Pengelolaan arsip yang dikelola secara baku sudah dilaksanakan oleh 52 Instansi yang meliputi 50 Perangkat Daerah dan Bagian serta 2 BUMD. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan SDM Pengelola kearsipan yang memadai.

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini:

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kunjungan perpustakaan (dan kearsipan)	Orang	-	-	13.233	13.730	17.589
Jumlah cakupan layanan perpustakaan di desa-kelurahan	Desa	12	2	7	12	14
Jumlah Perpustakaan	Unit	3	5	5	5	5

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013– 2017



Jumlah kunjungan perpustakaan (dan kearsipan) selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Pada tahun 2015, jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 13.233 orang. Jumlahnya bertambah 497 orang menjadi 13.730 orang pada tahun 2016. Selanjutnya jumlah kunjungan terus meningkat menjadi 17.589 orang pada tahun 2017, bertambah 3.859 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya angka kunjungan selama tiga tahun terakhir ini disebabkan oleh adanya koleksi buku-buku baru sehingga meningkatkan minat baca masyarakat.

Jumlah cakupan layanan perpustakaan di desa-kelurahan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jumlah cakupan yang pada tahun 2014 hanya bisa menjangkau 2 desa perlahan-lahan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga akhirnya mencapai 14 desa pada tahun 2017. Keadaan ini tentu merupakan kondisi yang menggembirakan karena bisa memperluas akses layanan perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Sampang.

Sedangkan jumlah perpustakaan yang tersedia 5 unit yang terdiri dari satu unit perpustakaan permanen, dua unit perpustakaan keliling (mobil pintar), dan satu unit rumah pintar Pulau Mandingan “Mutiarra Bangsa” satu unit rumah pintar trunojoyo. Perkembangan kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh adalah sebagai berikut:

23. Perencanaan Pembangunan

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sampang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen-dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan rencana pembangunan bersifat tahunan. Urusan perencanaan



pembangunan di Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Bappelitbangda, dengan rincian perkembangan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik Kriteria Baik: 1. Berorientasi pada Hasil 2. Target Jelas 3. Indikator SMART 4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra	%	N/A	53,33	75	80	100
Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD	%	N/A	82,87	90,35	100	99,72
Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD \geq 100%	%	45	55	65	75	61,11
Persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	50

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik dan Persentase program dalam RPJMD tertuang dalam RKPD sudah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD sudah hampir mencapai 100 persen. Namun demikian, indikator persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD \geq 100% dan persentase pemenuhan data analisis perencanaan pembangunan memerlukan perhatian lebih.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Kinerja urusan pertanian di Kabupaten sampang menunjukkan hasil yang bervariasi. Pertanian merupakan sektor potensial, dengan beberapa komoditas yang berpotensi menjadi unggulan daerah baik dalam tanaman pangan/palawija dan hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Sampang



dilaksanakan Dinas Pertanian dengan perkembangan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi tanaman pangan dan hortikultura							
Padi	Ton	246.369	218.071	250,677	249.114	260.680	290.527
Jagung	Ton	158.294	116.005	45,024	98.331	79.153	152.017
Ubi kayu	Ton	158.173	130.499	130,364	130.016	57.122	153.171
Kacang Tanah	Ton	24.241	43.788	21.220	24.395	19.811	36.118
Kedelai	Ton	34.634	41.744	44,485	41.687	45.078	32.083
Bawang Merah	Ton	9.138	24.482	27.311	26.849	26.850	33.796
Cabai	ton	9.682	6.062	11.302	24.598	24.598	29.960
Mangga	ton	15.401	21.989	17.212	16.384	16.384	145.476
Pisang	ton	9.126	10.490	9.231	8.500	8.550	43.688
Jambu Air	ton	3.695	2.774	2.851	2.321	2.321	16.682
Semangka	ton	1.395	725	657	350	350	823
Produksi Hasil Perkebunan							
Jambu Mente	ton	2.061,39	2.295	2.257	2.452,36	2.408,56	2.937
Kelapa	ton	767,44	852	797	873	628,39	742
Tembakau	ton	2.701,46	508	2.896	1.768,98	262,73	3.055
Wijen	ton	760	700	594	650,7	373,62	434
Cabe Jamu	ton	736,81	793	794	817,85	789,29	850
Produktivitas tanaman pangan utama							
Padi	ton/ha	5,71	5,47	5,13	5,34	4,88	11,32
jagung	ton/ha	1,88	1,79	1,73	1,82	1,81	2,89
Ubi Kayu	ton/ha	11,83	11,09	11,47	11,4	11,3	24,59
Kacang Tanah	ton/ha	0,99	1,91	0,48	1,11	0,95	1,75
Kedelai	ton/ha	1,68	1,7	1,61	1,62	1,51	2,18
Produksi Peternakan dalam 1 tahun							
Daging	ton	2.236,55	2.518,21	2.693,42	3.011,33	4.054,06	4.174,19
Telur	ton	496,38	1.030,38	1.058,61	1.060,37	2.045,48	5.042,48
Populasi binatang Ternak dalam 1 tahun							
Sapi	ekor	196.807	180.849	203,863	211.176	212.776	215.020
Kambing	ekor	45.786	45.663	45.539	45.994	46.182	46.587
Domba	ekor	9.043	9.123	9.204	9.296	9.360	9.631
Ayam Buras	ekor	462.744	463.854	464.086	761.101	762.026	774.645
Ayam Petelur	ekor	4.394	28.605	31.780	47.670	50.526	52.017
Ayam Pedaging	ekor	15.014	64.562	66.777	100.165	100.248	100.261
Itik	ekor	13.908	13.925	14.048	44.954	44.974	45.880

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2016

Berdasarkan tabel di atas, secara umum produktivitas tanaman pangan utama menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, hampir semua komoditas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya kecuali pada komoditas kedelai. Peningkatan produksi maupun produktivitas diduga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) Adanya optimasi lahan program APBN; (ii) Adanya permintaan pasar yang tinggi mendorong petani melakukan penanaman besar-besaran



terhadap komoditi tertentu; (iii) Adanya kondisi iklim yang baik untuk mengembangkan komoditi tertentu; dan (iv) Penurunan luas panen ubi kayu lebih disebabkan oleh penurunan harga pasar tepung tapioka secara nasional.

Selanjutnya, pada komoditas perkebunan hasil produksinya secara keseluruhan (semua komoditas) menunjukkan peningkatan baik pada komoditas jambu mente, kelapa, tembakau, wijen, maupun cabe jamu.

Pada sektor peternakan, seluruh indikatornya menunjukkan adanya peningkatan, baik dari produksi peternakan maupun populasi binatang ternak pada tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (i) minat masyarakat untuk beternak cukup tinggi, sehingga banyak peternak baru yang mandiri dan berkelompok; (ii) adanya teknologi kawin suntik (IB) sehingga banyak kelahiran; (iii) adanya pelatihan penerapan cara membuat pakan unggas dan ternak, sehingga lebih hemat dan mengurangi banyak pengeluaran. Beberapa program yang juga dipandang mendukung peningkatan produksi sektor peternakan antara lain: (i) Pembibitan dan perawatan ternak; (ii) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (iii) Intensifikasi Inseminasi Buatan; (iv) Kerjasama regional/nasional/ internasional pemeriksaan gangguan reproduksi hewan; (v) Integrasi ternak dan tanaman hortikultura. Selain itu, peningkatan kinerja sektor peternakan juga tidak lepas dari dukungan program dari Provinsi Jawa Timur seperti UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dan sebagainya.

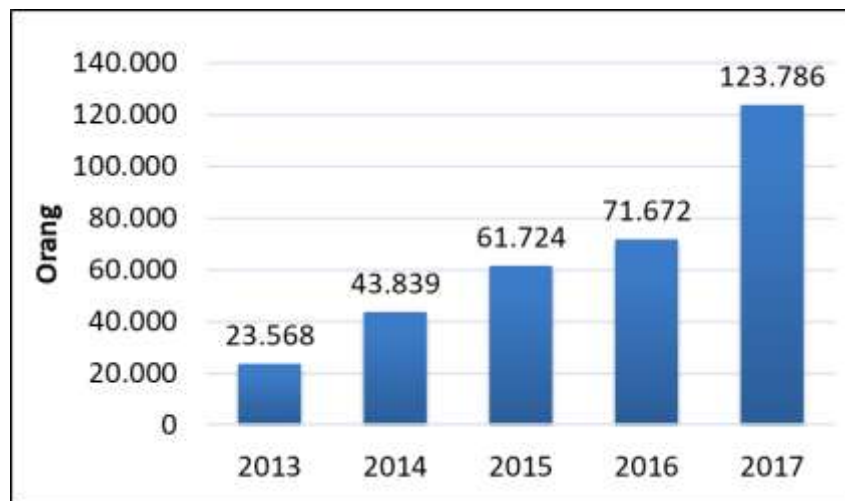
2. Pariwisata

Indikator kinerja pada urusan pariwisata menunjukkan kinerja yang meningkat pada tahun 2017. Hal ini ditunjukkan oleh Kunjungan Wisata yang meningkat hampir dua kali lipat dari 71.672 orang pada tahun 2016 menjadi 123.786 orang pada tahun 2017. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut



disebabkan atas konsistensi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, serta Program Pengembangan Kemitraan yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang. Disamping itu, adanya destinasi wisata baru dan revitalisasi destinasi wisata terutama di kawasan pesisir utara yang disertai dengan tumbuhnya wisata kuliner dipandang juga mendorong meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Sampang. Perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten Sampang sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 2.10
Perkembangan Kunjungan Wisata di Kabupaten Sampang



Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

3. Kelautan dan Perikanan

Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang menunjukkan kondisi yang bervariasi pada beberapa lapangan usaha sektor perikanan. Produksi perikanan kolam mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya produksi perikanan dari 601,83 ton pada tahun 2016 ton menjadi 724,79 ton pada tahun 2017. Begitupula dengan usaha perikanan perairan umum menunjukkan hasil yang baik yang ditunjukkan dengan produksi yang meningkat dari 17,73 ton pada tahun 2016 menjadi 21,16 ton pada tahun 2017.

Produksi perikanan tangkap dari laut menunjukkan penurunan pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2016 terkait pelarangan beberapa



alat tangkap yang merusak lingkungan, sehingga aktivitas penangkapan yang menggunakan alat tangkap seperti cantrang dan dogol berkurang. Begitu pula produksi perikanan tambak juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh lamanya bulan kering pada tahun 2017 sehingga tambak lebih banyak difungsikan untuk produksi garam. Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya produksi tambak adalah sering terjadinya banjir rob pada musim penghujan, sehingga banyak yang gagal panen.

Jumlah konsumsi ikan menunjukkan sedikit peningkatan dari 24,74 kg/kapita pada tahun 2016 menjadi 24,83 kg/kapita pada tahun 2017. Seiring dengan kondisi tersebut, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB meningkat menjadi sebesar 8,97 persen. Rincian perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Uraian	satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi perikanan dalam 1 tahun						
Kolam	ton	290,5	348,4	500,5	601,83	724,79
Perairan Umum	ton	28,90	28,82	22,77	17,73	21,16
Laut	ton	9.296,58	9.347,40	7.130,86	7.543,71	6.965,59
Tambak	ton	2.745,7	5.249,8	6.559,9	7.501,45	662,17
Jumlah konsumsi ikan dalam kg/kapita/th	Kg/kapita/th	23,68	24	24,54	24,74	24,83
Kontribusi sektor perikanan Terhadap PDRB	%	10,12	9,14	9,23	8,05	8,97

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 – 2017

4. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sampang menunjukkan kondisi yang semakin meningkat. Kontribusi sektor perdagangan sebesar 19,40 persen pada tahun 2017, dimana pada tahun sebelumnya bernilai 19,15 persen. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:



Tabel 2.38
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	%	29,28	18,64	18,91	19,15	19,40

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

5. Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Sampang menunjukkan sedikit penurunan. Kontribusi sektor perindustrian sebesar 3,82 persen pada tahun 2017, dimana pada tahun sebelumnya bernilai 3,86 persen. Berkurangnya kontribusi sektor perindustrian disebabkan oleh kontribusi sub sektor industri makanan dan minuman serta barang galian bukan logam yang menurun. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi PDRB dari Sektor Industri	%	1,05	4,04	3,98	3,86	3,82

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2016

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa fokus antara lain fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Secara rinci, penjelasan dari aspek daya saing daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2016, menunjukkan adanya peningkatan. Pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan sesuai dengan kemampuan daya beli dalam satu tahun. Pada tahun 2016 realisasi pengeluaran rumah sebesar Rp 21,66 juta. Nilai tersebut diperoleh dari total pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 5.707.996 juta dibagi dengan total jumlah rumah tangga sebesar 263.508 (sesuai hasil analisis konsumsi pangan Kabupaten Sampang Tahun 2016).



Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada Tahun 2016, realisasinya tidak berubah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 81,44 persen. Perkembangan konsumsi Rumah Tangga perkapita di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013-2016

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rp.	15,08	17,01	19,99	21,66	N/A
Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	%	80	80,24	81,44	81,44	N/A

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2016

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah berupa infrastruktur di Kabupaten Sampang, secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Pengukuran kinerja fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Tabel 2.41
Ketersediaan Fasilitas Infrastruktur Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penginapan/hotel	4	4	5	6	6
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	25,88	28,56	32,08	54,88	N/A
Prosentase Rumah tangga pengguna air bersih (RT)	22,26	26,80	30,01	N/A	N/A

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2016

Peningkatan ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur ditandai dengan peningkatan cakupan rumah tangga pengguna listrik sebesar 54,88 persen. Sedangkan untuk jumlah hotel sebesar 6 unit tidak mengalami perubahan.



2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Meminimalisir jumlah tindak kriminal adalah salah satu langkah untuk meningkatkan iklim berinvestasi. Angka kriminalitas pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Jumlah kriminalitas pada tahun 2017 sebanyak 416 kasus, dengan kasus terbesar terdapat pada pencurian. Peningkatan kasus yang signifikan terdapat pada kasus penyalahgunaan narkoba, sebesar 95 pada tahun 2017, dimana sebelumnya hanya 91 pada tahun 2016. Perkembangan kejadian kriminalitas di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Kejadian Kriminalitas Tahun 2012-2016

Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus Narkoba	29	32	36	59	91	95
Jumlah kasus Pembunuhan	8	5	5	8	6	9
Jumlah Kejahatan Seksual	20	23	23	18	15	13
Jumlah kasus Penganiayaan	12	21	21	17	22	25
Jumlah kasus Pencurian	121	140	140	114	118	123
Jumlah kasus Penipuan	15	40	34	40	52	58
Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	1	-
Jumlah Kasus Lain	108	38	25	83	44	93
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun (Kejadian)	313	298	284	339	349	416

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2013 - 2017

2. Aspek Pelayanan Perijinan

Perkembangan jumlah perijinan di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada jenis ijin/permodalan serta jenis usaha yang masing-masing sebesar 504 dan 507. Penurunan nilai perijinan di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 disebabkan adanya masa transisi, dari proses perijinan yang semula seluruh jenis perijinan ditangani oleh KP3M pada tahun 2016, kemudian didelegasikan kepada Kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan PERBUP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perijinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Adanya pendelegasian tersebut ternyata



belum berjalan secara optimal, sehingga jumlah jenis usaha dan ijin menunjukkan adanya penurunan. Perkembangan ijin usaha di Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.43
Realisasi Perijinan Tahun 2013-2017

TH.	Jenis Ijin/Permodalan							JML	Jenis Usaha						JML
	SIUP Mikro	SIUP Kecil	SIUP Mngh	SIUP Besar	SIU JK	TDI	IG		PO	UD	CV	PT	KOP	BP L	
2013	106	385	73	2	118	31		715	426	-	188	25	7	1	647
2014	89	310	59	1	143	11		613	471	68	128	66	4	2	739
2015	123	384	91	6	126	32		762	526	0	181	36	8	-	751
2016	73	219	168	9	140	14	2	625	269	-	298	40	13	-	620
2017	86	193	18	5	9	103	3	504	233	-	223	47	4	-	507

Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2014-2017

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu factor penting dalam pembangunan daerah, yang dapat menjadi modal dan beban pembangunan. Peningkatan sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dari capaian IPM dan kondisi tenaga kerja.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Penghitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar yaitu : (i) Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat) yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); (ii) Pendidikan (pengetahuan), yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas; dan (iii) Standar hidup layak, yang dihitung dari Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Secara umum, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan. IPM Kabupaten Sampang pada tahun 2017 sebesar 59,90 atau mengalami peningkatan sebesar 0,81 dari tahun

sebelumnya. Perkembangan IPM Kabupaten Sampang pada tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.11
IPM Kabupaten Sampang Tahun 2012-2017



Sumber: Publikasi BPS, 2018

Rincian nilai IPM Kabupaten Sampang Tahun 2012-2017, dari masing-masing indikator baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.44
IPM Kabupaten Sampang Tahun 2012 - 2017

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran PerKapita (000)	IPM	Peningkatan IPM
2012	67,43	9,86	3,27	7.691,64	55,78	0,61
2013	67,46	10,20	3,34	7.769,25	56,45	0,67
2014	67,48	10,39	3,49	7.797,85	56,98	0,53
2015	67,58	11,09	3,65	7.827,00	58,18	1,20
2016	67,59	11,70	3,70	8.145,86	59,09	0,83
2017	67,67	11,38	4,12	8.352,00	59,90	0,81

Sumber data : Publikasi BPS, 2018

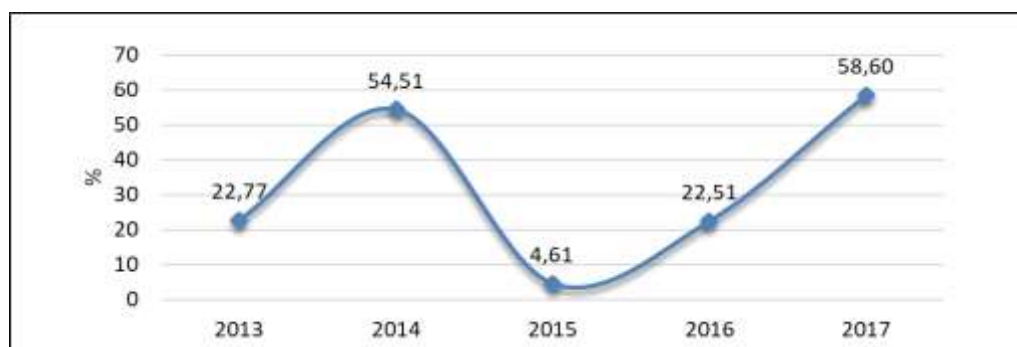
2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu input produksi, yang menentukan tingkat produktivitas dalam sebuah perekonomian. Tingginya jumlah angkatan kerja (penduduk pada usia kerja) dapat menjadi sebuah peluang atau ancaman dalam pembangunan. Angkatan kerja yang tinggi merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan produksi dan menciptakan kegiatan ekonomi baru. Namun, jika tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja akan menjadi ancaman bagi pembangunan.

Oleh sebab itu, kebijakan yang menjadi fokus pemerintah adalah perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Arah kebijakan

yang ditetapkan untuk mendukung strategi tersebut adalah meningkatkan kompetensi/kapasitas angkatan kerja. Melalui arah dan kebijakan tersebut, diperlukan pembekalan terhadap tenaga kerja misalnya berupa pelatihan. Selain itu, tenaga kerja juga perlu dilindungi dengan beberapa regulasi tertentu, misalnya dengan norma BPJS ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja. Perkembangan Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Sampang



Sumber: LKPJ Bupati Sampang Tahun 2012 – 2017

Target pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 50 persen dan terealisasi 58,60 persen. Nilai tersebut diperoleh dari 184 orang pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan 314 orang seluruh pencari kerja yang terdaftar berdasarkan AK. 1 (Kartu Kuning) di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Diskumnaker Kabupaten Sampang.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian kinerja sampai dengan tahun 2016, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013 – 2018. Selain itu, tujuan lain dari evaluasi adalah untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi, yang ditinjau dari urusan yang dilakukan baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan. Hasil evaluasi pada masing-masing program disertai dengan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.46
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2017 Kabupaten Sampang





















































2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Meskipun penyelenggaraan pembangunan pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 telah menunjukkan hasil positif bagi kemaslahatan masyarakat Sampang, namun terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani secara berkelanjutan pada periode-periode yang akan datang. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan *gap expectation* antara kondisi saat ini (capaian/kinerja pembangunan sampai saat ini) dengan kondisi yang ingin dicapai/direncanakan dan/atau kondisi yang dijadikan *benchmarking*. Permasalahan pembangunan tersebut dapat diidentifikasi secara rinci sebagai berikut:

1. Permasalah pembangunan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, adalah:
 - a. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada tahun 2017 baru mencapai 4,12 tahun dan 11,38 tahun. Hal itu tentunya sangat mempengaruhi IPM Kabupaten Sampang yang masih tergolong rendah.
 - b. Masih kurangnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sampang yang baru mencapai sebesar 67,67 Tahun Pada Tahun 2017.
 - c. Masih banyaknya permukiman kumuh dan belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum permukiman
 - d. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat dan sarana sanitasi masyarakat masih rendah
 - e. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi belum maksimal.
 - f. Penduduk yang mendapat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih belum maksimal.
 - g. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat belum optimal.
 - h. Tingginya angka kemiskinan
2. Permasalah pembangunan terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah, adalah:



- a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur Jalan dan Jembatan.
 - b. Penyediaan fasilitas sarana perhubungan baik darat maupun laut belum baik.
 - c. Pengeloaan sumber air baku belum maksimal.
3. Permasalahan pembangunan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, adalah:
- a. Masih rendahnya iklim investasi
 - b. Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk koperasi UMK
 - c. Belum optimalnya kinerja BUMD
 - d. Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah (*value added*)
 - e. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata
 - f. Industri kecil belum tumbuh secara optimal
 - g. Pengelolaan pasar tradisional belum optimal
 - h. Tingkat partisipasi angkatan kerja belum optimal
4. Permasalahan pembangunan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, adalah:
- a. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Masih tingginya intensitas bencana
 - d. Belum optimalnya layanan infrastruktur Pengendalian Banjir
5. Permasalahan pembangunan terkait dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat, adalah:
- a. Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik
 - b. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah keterbukaan informasi publik belum optimal
 - c. Akses Teknologi Informasi bagi masyarakat rendah
 - d. Jumlah desa mandiri masih rendah
 - e. Angka Kriminalitas masih tinggi. Pada tahun 2017 terjadi 416 kejadian kriminalitas, hal tersebut karena masih tingginya kasus pencurian dan narkoba sehingga perlu penanganan secara komprehensif dan meningkatkan



peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

- 1) Masih rendahnya APK PAUD. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD diperoleh dari jumlah semua siswa yang bersekolah pada jenjang PAUD/TK/RA sebanyak 29.228 siswa di bagi jumlah anak yang berusia 4 - 6 tahun sebanyak 35.193 siswa Sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini masih banyak yang tidak memadai, baik meubeler Sekolah maupun sarana bermain anak-anak
- 2) Masih rendahnya APM SMP/MTs/Paket B. pada tahun 2017 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B capaiannya sebesar 73,86 %, rendahnya capaian APM SMP/MTs/Paket B karena banyak siswa masuk sekolah lebih awal dari usia yang seharusnya masuk jenjang SMP/MTs (13 – 15 Tahun)
- 3) Persentase sekolah dengan akreditasi A masih sangat rendah, diperoleh dari jumlah sekolah SD dan SMP yang akrediasinya A sebanyak 35 lembaga dibagi dengan jumlah seluruh sekolah SD/SMP sebanyak 882 lembaga
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah, baik kualitas maupun tingkat kesejahteraannya.

2.3.2.2 Kesehatan

- 1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate). Pada tahun 2017 Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Sampang mencapai 86,4 per 100.000 Kelahiran Hidup. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi dan anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, serta pola kerja rumah tangga.
- 2) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate). Pada Tahun 2017 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sampang mencapai 8,46 per 1000 Kelahiran Hidup. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi



kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malagizi. Beberapa faktor berkontribusi pada kematian bayi seperti tingkat pendidikan ibu, kondisi lingkungan, dan infrastruktur politik dan pengobatan. Menyediakan sanitasi, akses air minum bersih, imunisasi melawan penyakit infeksi, dan langkah-langkah kesehatan publik lainnya dapat membantu mengurangi tingkat kematian bayi.

- 3) Masih banyaknya kasus balita gizi buruk. Berdasarkan hasil PSG yang telah dilakukan pada tahun 2017, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Sampang sebesar 1,2%. Semua balita gizi buruk yang diidentifikasi tersebut telah ditangani dengan baik melalui pemberian makanan tambahan (PMT Pemulihan) serta pendampingan oleh tenaga gizi. Indikator ini merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil persentase capaiannya semakin baik hasil pembangunan kesehatan.
- 4) Semakin banyaknya Angka Notifikasi Kasus pada TBC. Pada tahun 2017 di Kabupaten Sampang Angka Notifikasi Kasus TB (CNR TB) mencapai 116,38 per 100.000 penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 116 kasus baru TB di setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Sampang. Makin tingginya kasus baru TB yang ditemukan di Kabupaten Sampang pada Tahun 2017 disebabkan oleh semakin baiknya penemuan aktif oleh tenaga kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara mandiri ke Puskesmas terdekat.
- 5) Masih banyaknya prevalensi Kusta. Di Kabupaten Sampang pada Tahun 2017 prevalensi kusta mencapai 3,16 per 10.000 penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa di setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Sampang terdapat 3 orang penderita kusta. Pengobatan secara teratur selama 6 bulan pada penderita kusta adalah salah satu cara pemutusan mata rantai penularan. Salah satu masalah yang menghambat upaya penanggulangan kusta adalah adanya stigma yang melekat pada penderita kusta termasuk keluarganya. Stigma negatif tersebut menyebabkan diskriminasi dalam kehidupan social sehingga penderita kusta enggan memeriksakan diri secara aktif dan melakukan pengobatan. Hal ini akan mengakibatkan berlanjutnya penularan kusta.



- 6) Incidence Rate penyakit DBD yang tinggi. Pada tahun 2017 Incidence rate penyakit DBD pada tahun 2017 sebesar 16,18 per 100.000 penduduk. Selain sanitasi lingkungan yang buruk, perubahan iklim juga mempengaruhi kehidupan vector penyebab penyakit DBD yaitu nyamuk Aedes Aegypti. Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui program 3 M Plus masih menjadi program unggulan mengurangi kejadian DBD. Upaya fogging merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan penyakit DBD.
- 7) Prevalensi Hipertensi yang masih besar. Di Kabupaten Sampang pada Tahun 2017 ditemukan 2,64% penduduk usia 18 Tahun ke atas menderita Hipertensi. Prevalensi tersebut mengalami penurunan dibanding Tahun 2016 yang sebesar 5,48%. Faktor resiko hipertensi antara lain umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetic, kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, alcohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, dan stres.
- 8) Prevalensi Diabetes Melitus semakin banyak. Pada tahun 2017 prevalensi diabetes mellitus di Kabupaten Sampang mencapai 0,63%. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dari capaian tahun 2016 sebesar 0,33%. Peningkatan prevalensi ini harus diwaspadai meskipun diabetes mellitus bukan penyakit menular. Program pengendalian untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular saat ini yaitu melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat). Upaya yang dapat dilakukan antara lain cek kondisi kesehatan secara berkala, tidak merokok, rajin aktifitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kendalikan stress.
- 9) Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN belum optimal. Sesuai profil kesehatan Kabupaten Sampang pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebesar 958.082 jiwa. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa 689.685 jiwa (71,99%) penduduk Kabupaten Sampang telah terdaftar menjadi peserta JKN.
- 10) Kasus stunting masih cukup tinggi yang masih mencakup 26,7% pada 10 desa stunting.



2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1) Masih banyaknya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat. Pada tahun 2017 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik terealisasi 869.691 m dari target 869.292 m (78.16%) dari total panjang jalan kabupaten yaitu 1112,636 m. Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik terealisasi 146 jembatan dari target 156 jembatan (93,59%).
- 2) Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tidak optimal, sehingga banyak yang mengalami kerusakan. Pada tahun 2017 panjang jaringan irigasi adalah 100.229 m, kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan realisasinya hanya mencapai mencapai 5,68%.
- 3) Program pengendalian banjir untuk DAS Kamoning belum baik baik di anak sungai maupun di sungai komuning masih dalam proses pelaksanaan, sehingga luasan genangan banjir di wilayah kota masih tinggi. Genangan air meningkat karena tingginya debit air di daerah hulu, drainase yang kurang bagus di daerah hilir (daerah Perkotaan) juga semakin banyaknya dataran banjir yang berubah fungsi yang menjadi daerah pemukiman. Pada tahun 2017 luas genangan banjir mencapairealisasinya mencapai 30.11 Ha
- 4) Perencanaan Tata Ruang hanya mencapai 47,39%. Hal ini disebabkan kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kota Kecamatan Sampang masih dalam tahap persetujuan substansi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur.

2.3.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni. Pada tahun 2017 rumah layak huni mencapai 103.087 rumah dari total 216.200 rumah tangga yang ada di Kabupaten Sampang, sehingga capaiannya sebesar 47,68%.
- 2) Tingginya kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2017 terealisasi hanya 0,94% dari luas permukiman sebesar 31.058 Ha kumuh,
- 3) Cakupan rumah tangga berakses air minum masih rendah, baru mencapai 33,70%. Dari jumlah rumah tangga sebesar 239.616 rumah tangga yang berakses air minum hanya sebesar 80.750.



- 4) Rendahnya cakupan rumah tangga bersanitasi , pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 138.681 rumah dari total 239.616 rumah atau terealisasi sebesar 57,88%.

2.3.2.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 mencapai 80,68 % yang diperoleh dari 71 kasus yang selesai dari 88 kasus hasil operasi.
- 2) Penanganan Bahaya Kebakaran (atas kebakaran yang terjadi) Kabupaten Sampang tahun 2017 sebesar 93,18%. Data ini diperoleh dari 41 kejadian kebakaran yang ditangani dibagi 44 total kejadian kebakaran. Kurang maksimalnya penanganan kebakaran karena kejadian kebakaran tertangani karena Lokasi Kebakaran Terlalu jauh dengan jarak Tempuh sekitar 1 (satu) jam.
- 3) Kurangnya pemberdayaan dan kesejahteraan Anggota Satlinmas Desa.
- 4) Masih rawannya konflik sosial.

2.3.2.6 Sosial

- 1) Masih tingginya jumlah PMKS. Tahun 2017 PMKS yang ditangani sebanyak 11.286 orang dari jumlah 83.963 orang.
- 2) Minimnya penanganan PMKS yang mendapat Layanan Program Pemberdayaan pada Tahun 2017 sebanyak 6.038 orang dari total seluruh PMKS sebanyak 83.963 orang.
- 3) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat sistem perlindungan dan bantuan Sosial pada Tahun 2017 sebanyak 10.483 orang dari total seluruh PMKS sebanyak 83.963.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

- 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja belum optimal, yaitu jumlah penduduk usia kerja (15-64) sebanyak 581.711 angkatan kerja dibanding jumlah penduduk usia kerja sebanyak 769.688.
- 2) Masih minimnya Rasio Lulusan S1/S2/S3. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 sebesar 19.778 orang dibagi Jumlah angkatan kerja sebesar Tahun 2017 sebanyak



581.711 ($19.778/581.711 \times 100 = 3,40$). Hal tersebut karena kapasitas untuk melanjutkan kejenjang lebih tinggi terkendala oleh biaya ekonomi keluarga yang tidak mampu, sisi lain program beasiswa tidak banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat khususnya daerah pedesaan.

- 3) Rasio Ketergantungan masih tinggi. Jumlah penduduk <15 tahun ditambah >64 tahun sebanyak 295.248 orang dan penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 769.688 orang,
- 4) Angkatan kerja yg terfasilitasi oleh pemerintah masih minim.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan perolehan sebesar 50,18 %. diperoleh dari jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintahan sebanyak 2.942 orang dibagi jumlah Pekerja Perempuan sebanyak 5.862 orang.
- 2) Banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah.

2.3.2.9 Pangan

- 1) Masih banyaknya desa rawan pangan. Pada tahun 2017 terdapat desa rawan pangan di kabupaten sampang masih sama dengan keadaan tahun 2016 yaitu 33 desa.
- 2) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita masih minim. Pada tahun 2017 ditargetkan Angka Konsumsi RT per Kapita/Tahun direalisasikan sebesar Rp23,72 juta. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan

2.3.2.10 Pertanian

- 1) Luas lahan bersertifikat masih minim. di Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2017 terealisasi sebesar 12.820,24 ha atau 10,39% dari jumlah luas lahan di Kab. Sampang sebesar 123.333 ha.



- 2) Penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan masih sangat minim. Dari 34 pengaduan yang terdaftar terselesaikan sebanyak 4 pengaduan atau 11,76 %, terdiri dari RSUD (sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri); Puskesmas Bringkoning (sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri); Pasar Jelgung (proses sertifikat di BPN); SD. Asem Jaran 2 Banyuates

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

- 1) Masih tingginya luas lahan kritis. Tahun 2017 realisasinya 35,818 ha.
- 2) Minimnya ruang terbuka hijau. Ruang RTH 2016 122,884 ha ditambah penanaman Pohon di area luas lahan kritis sebesar 4,6 Ha dan ditambah dari kegiatan yang ditangani oleh DLH sebesar 0,5 Ha sehingga menjadi 127,984 ha. Minimnya RTH ini karena terbatasnya lahan khususnya di wilayah perkotaan.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Masih kurangnya target penduduk ber KTP-el pada Tahun 2017 yaitu sebesar 78,57%, atau sejumlah 645.819 jiwa.
- 2) Penduduk ber-akta kelahiran dan kematian adalah 81,09%.
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan/pelaporan kematian sehingga capaian akta kematian masih belum maksimal.
- 4) 50% server yang berada di Kecamatan dalam kondisi rusak dan 50% yang lain dalam kondisi kritis.

2.3.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Jumlah LPM berprestasi masih minim
- 2) Desa dengan PADes di atas 30% dari APBDDesa masih minim.
- 3) Kompetensi SDM Penyelenggaraan Pemeritahan Desa masih belum optimal, termasuk terkait pelaksanaan UU Desa, Pada tahun 2017, Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDDes yang tepat waktu masih di bawah 25 persen, begitu pula Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan
- 4) Belum adanya Pengaturan terhadap Pengelolaan Aset Desa, dan Sumber Daya lain. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2017,



jumlah desa yang telah melaksanakan tertib administrasi (desa) dan penataan aset desa masih kurang dari 30 desa.

2.3.2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif masih belum optimal, yaitu sebesar 75,72% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebanyak 175.298 akseptor dibagi Jumlah PUS sebanyak 231.495 pasang. Belum optimalnya capaian peserta KB aktif karena untuk meningkatkan prevalensi KB aktif dibutuhkan kesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang lebih tinggi seperti Implant, IUD, MOW dan MOP dibandingkan Metode kontrasepsi NON MKJP seperti PiL, Suntik, dan Kondom.
- 2) Tidak maksimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana, dikarenakan pelayanan MOW dan MOP masih tersentralisasi di Kabupaten, sedangkan di kecamatan tidak melayani pelayanan MOW dan MOP.
- 3) Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan Kampung KB.
- 4) Masih banyak usia remaja yang belum memahami pentingnya kesehatan reproduksi.

2.3.2.15 Perhubungan

- 1) Masih tingginya Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 115 kecelakaan ada peningkatan jumlah angka kecelakaan sebesar 5 jiwa dari tahun 2016.
- 2) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah mengalami peningkatan jumlah kendaraan 84.265 Kendaraan dibandingkan panjang jalan yang ada 582,8 KM sedangkan Tahun 2016 Jumlah kendaraan sebesar 83.899 Kendaraan panjang jalan tidak ada perubahan sebesar 582,8 KM.
- 3) Pemenuhan Standart Keselamatan Bagi Angkutan Umum masih minim. Tahun 2017 sebesar 5,6% dikarenakan banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi layak jalan sehingga akan berakibat jumlah angka kecelakaan bertambah.
- 4) Rendahnya konektivitas transportasi bagi masyarakat kepulauan.



2.3.2.16 Komunikasi dan Informatika

- 1) Masih rendahnya kualitas informasi melalui Website Perangkat Daerah, yang aktif hanya terealisasi 63 unit terdiri dari 42 Perangkat Daerah dan 21 Puskesmas.
- 2) Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi di Perangkat daerah masih kurang. semua SKPD (Dinas/Badan) Sudah terkoneksi 100%. Kendala saat ini 70% perangkat wireless di setiap SKPD mengalami penurunan kinerja dikarenakan faktor usia dan penurunan performa perangkat wireless. Adanya server induk yang tidak berada dalm satu kantor Diskominfo menjadikan pengelolaan server menjadi kurang optimal dan distribusi bandwith yang hanya 63 mbps masih jauh dari kondisi ideal. Dan SDM dibidang TI kurang sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak maksimal.

2.3.2.17 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Semakin berkurangnya koperasi sehat. Dari jumlah RAT Sebanyak 214 Koperasi didapat yang layak dalam katagori sehat sebanyak 162 atau sebesar 75,70 % dari jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT.
- 2) Kualitas peningkatan UMK belum optimal. Pada tahun 2017 sebanyak 2.071 pelaku usaha mikro sehingga dapat menambah daftar perolehan jumlah UMK dari data jumlah UMK Tahun 2016 Sebanyak 27.660 menjadi 29.731. namun demikian kaulitas dari pertumbuhan UMK belum optimal.
- 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tergat yang yang direncanakan tidak tercapai karena Para Pelaku usaha UMK yang telah terfasilitasi program Dana bergilir ada yang mengalami kebangkrutan usaha dan mengakibatkan tidak berlanjut usahanya sehingga pengembalian dana bergulir baik *pokok dan jasa* yang ada di masyarakat mengalami tunggakan dan kemacetan.

2.3.2.18 Penanaman Modal

- 1) Pada tahun 2017, terjadi penurunan nilai investasi di Kabupaten Sampang. Penurunan investasi tersebut disebabkan masa transisi dari proses perijinan yang semula seluruh jenis perijinan ditangani oleh DPM PTSP pada tahun 2017 sesuai dengan PERBUP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perijinan Melalui Pelayanan



Administrasi Terpadu Kecamatan melalui Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) ternyata belum berjalan secara optimal .

- 2) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2017 realisasi sebanyak 507 investor, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru.
- 3) Perijinan yang dikelola oleh DPMPTSP baru mencapai 30% dari total perijinan yang ada. Selebihnya masih dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

2.3.2.19 Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Organisasi Kepemudaan aktif tidak berkembang dengan baik. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 digolongkan berdasarkan ada tidaknya badan hukum dan tidak mengalami perubahan jumlah.
- 2). Kabupaten sampang belum mempunyai stadion olah raga, sehingga belum dapat memfasilitasi kebutuhan saran berlatih dan pengembangan karir olah raga.

2.3.2.20 Statistik

Penyediaan data statistik dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh kinerja Badan Pusat Statistik. Kebutuhan Dokumen Statistik (Kompilasi Data Kabupaten (DDA), Kompilasi Data Kecamatan (KDA), Tinjauan Ekonomi Makro (PDRB), dan Eksekutif Summary Susenas) belum terlaksana tepat waktu. Penerbitan Dokumen Statistik tepat waktu menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan semakin baik, karena data analisis digunakan untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang

2.3.2.21 Kebudayaan

Potensi kebudayaan di Kabupaten Sampang belum terinventarisir secara baik, sehingga menghambat pada proses pembinaan dan pelestariannya.

2.3.2.22 Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Ketersediaan buku-buku perpustakaan terbatas. Waldaerah. apun minat baca masyarakat menjadi meningkat namun tidak diimbangi dengan penyediaan buku-buku perpustakaan yang baru.



- 2) Jumlah perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku meningkat, namun secara kualitas masih belum optimal. Diperlukan pembinaan arsiparis di semua perangkat daerah. Pada tahun sebanyak 52 PD telah melaksanakan Arsip secara baku yaitu 42 OPD dan di tambah 10 BUMN.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

- 1) Produksi perikanan tangkap dari laut, terealisasi sebesar 6.965,59 ton dari target sebesar 7.418,95 ton (93,89 %). Kondisi ini disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2016 terkait dengan pelarangan beberapa alat tangkap yang merusak lingkungan, sehingga aktivitas penangkapan yang menggunakan alat tangkap seperti cantrang dan dogol berkurang.
- 2) Produksi perikanan tangkap dari perairan umum, terealisasi sebesar 21,16 ton dari target sebesar 23,68 ton (89,35%), kondisi ini disebabkan aktivitas penangkapan ikan di perairan umum berkurang karena sering terjadi pasang rob.
- 3) Kebutuhan akan tempat pelelangan ikan sangat mendesak, namun karena terkendala kewenangan, sehingga penyediaan tempat pelelangan ikan baik di Kecamatan Camplong dan Kecamatan Ketapang belum teralisasi. Program pengembangan budidaya perikanan
- 4) Produksi perikanan tambak dalam 1 tahun, terealisasi 662,17 ton dari target 2.651,18 ton (24,8 %). Rendahnya capaian produksi tambak ini disebabkan panjangnya waktu kemarau sehingga tambak lebih banyak difungsikan untuk produksi garam. Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya produksi tambak adalah sering terjadinya banjir rob pada musim penghujan, sehingga banyak yang gagal panen.

2.3.2.24 Pariwisata

- 1) Banyak potensi wisata alam yang belum dikelola secara maksimal. Kultur budaya masyarakat menjadi modal yang harus dapat disinergikan dengan pengembangan pariwisata.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pariwisata belum berkembang secara baik di Kabupaten Sampang.



2.3.2.25 Pertanian

- 1) Pencapaian peningkatan produksi pertanian dan hortikultura tidak diimbangi dengan industri pengolahannya, sehingga tidak dapat memberikan nilai lebih pada pendapatan petani.
- 2) Produk unggulan belum dikembangkan secara baik.
- 3) Produksi sapi madura tidak berkembang secara baik.
- 4) Realisasi produksi kedelai sebagai produk unggulan tidak tercapai. Hal itu lebih disebabkan perluasan area tanam tertentu atau kecenderungan sebagian petani mengubah pola tanam mengarah kepada komoditi padi dan jagung
- 5) Realisasi produksi wijen 433,79 ton tidak mencapai target 600 ton karena terbatasnya informasi pasar sehingga tidak banyak petani budidaya wijen.

2.3.2.26 Perdagangan

- 1) Pembangunan Sarana Promosi Perdagangan, berupa rest area belum terlaksana karena berdekatan dengan rest area yang telah dibangun oleh swasta
- 2) Penyediaan sarana perdagangan berupa pasar sehat belum terpenuhi secara optimal
- 3) Pelaksanaan tera ulang sebagai sumber pendapatan daerah tidak maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia belum tersedia
- 4) Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen.

2.3.2.27 Perindustrian

- 1) Sulitnya penyediaan lahan bagi investor, khususnya di wilayah pengembangan, sektor industri belum berkembang secara maksimal
- 2) Kurangnya mutu produk industri kecil
- 3) Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri
- 4) Rendahnya ketrampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi utamanya hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.



2.3.2.28 Perencanaan

- 1) Capaian Indikator sasaran RPJMD masih banyak yang belum baik, hal tersebut dibuktikan dengan capaian indikator ≥ 100 sebanyak 22 indikator dari 36 Indikator sasaran selebihnya masih kurang atau belum tercapai
- 2) Jumlah aparatur perencana masih kurang
- 3) Integrasi perencanaan dan penganggaran belum optimal

2.3.2.29 Keuangan

- 1) Realisasi pendapatan masih kurang dari target. Pada Tahun 2017 dari target PAD sebesar Rp.211.396.038.250,00 terealisasi sebesar Rp.207.448.445.816,75 atau 98,13%. Tidak tercapainya Target PAD Tahun 2017 ini dikarenakan ada dua komponen pendukung yang tidak mencapai target. Yaitu :
 - 2) Retribusi Daerah
Target Retribusi Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp.15.032.800.053,00 terealisasi sebesar Rp.10.917.030.412,00 atau 72,62%.
 - 3) Lain-lain PAD yang sah
Target Lain-lain PAD yang Sah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp.170.567.277.942,00 terealisasi sebesar Rp.169.722.682.060,72 atau 99,50%. Dengan tidak tercapainya dua komponen PAD tersebut berpengaruh terhadap jumlah realisasi PAD seperti yang telah ditargetkan yaitu dari target PAD sebesar Rp.211.396.038.250,00 terealisasi sebesar Rp.207.448.445.816,75 atau 98,13%.

2.3.2.30 Pengawasan

Kapasitas Sumber Daya Aparat Pengawasan masih kurang. Dari segi jumlah aparatur pengawasan yang telah memperoleh sertifikasi auditor juga terbatas

2.3.2.31 Kepegawaian

- 1) Masih banyaknya ASN yang tidak memenuhi standart kompetensi sesuai bidangnya
- 2) Belum terpenuhinya Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan dan Kompetensi



- 3) Belum diberlakukannya tunjangan kinerja untuk memacu kinerja ASN
- 4) Jumlah kasus pelanggaran disiplin masih tinggi, pada tahun 2017 jumlah kasus pelanggaran yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 37 kasus dibagi dengan jumlah PNS per 31 Desember 2017 sebanyak 7.264 orang.
- 5) Masih terbatasnya ASN yang mengikuti diklat struktural dan fungsional. Pada tahun 2017 ASN yang mengikuti diklat yaitu sebanyak 135 orang

2.3.2.32 Sekretariat Daerah

- 1) Nilai SAKIP masih CC. Data yang diperoleh tahun 2017 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sampang Tahun 2017 adalah 55,83 atau dengan predikat CC.

Tabel 2.47
Nilai SAKIP Kabupaten Sampang Tahun 2016-2017

Komponen yang dinilai		2016		2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan kinerja	30	16,75	30	19
B	Pengukuran kinerja	25	9,8	25	13,69
C	Pelaporan kinerja	15	9,74	15	9,15
D	Evaluasi internal	10	3,74	10	3,13
E	Capaian kinerja	20	10,03	20	10,85
Nilai hasil evaluasi		100	50,06	100	55,83
Tingkat akuntabilitas kinerja			CC		CC

Nilai SAKIP Kabupaten Sampang Tahun 2017 belum mencapai target tetapi nilainya sudah meningkat dibandingkan 2016 karena belum terlihat upaya serius yang signifikan dan terukur untuk menerapkan manajemen berbasis kinerja

- 2) Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,15 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2016.



- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sampang belum maksimal, pada tahun 2017 adalah 79,97.
- 4) Koordinasi lintas perangkat daerah masih sulit dilakukan.
- 5) Pembinaan BUMD tidak maksimal. Karena sebagian BUMD Kabupaten Sampang sedang dalam masalah hukum.

2.3.2.33 Penanggulangan Bencana

- 1) Kesadaran masyarakat akan terjadinya bencana alam khususnya banjir masih sangat rendah. Sehingga intensitas bencana pada tahun 2017 terjadi 61 kejadian bencana.
- 2) Pencegahan dini dan penanganan tanggap darurat bencana tidak maksimal. Pada tahun 2017 hanya 50% dari kejadian bencana yang tertangani
- 3) Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana, terutama pengendalian banjir sehingga perlu kerjasama dan integrasi antar pemerintahan.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Sampang	2
Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi.....	12
Gambar 2.3 Kepadatan dan Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 – 2017	13
Gambar 2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sampang	15
Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2017	18
Gambar 2.6 Pendapatan Per Kapita Kab. Sampang Tahun 2011 – 2017	19
Gambar 2.7 Inflasi Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2017	20
Gambar 2.8 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017	21
Gambar 2.9 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017	21
Gambar 2.10 Perkembangan Kunjungan Wisata di Kabupaten Sampang.....	50
Gambar 2.11 IPM Kabupaten Sampang Tahun 2012-2017	56
Tabel 2.1 Rincian Klasifikasi Kelerengan Tanah di Kabupaten Sampang.....	2
Tabel 2.2 Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Sampang	4
Tabel 2.3 Wilayah di Kabupaten Sampang	9
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016 – 2017	14
Tabel 2.5 PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	16
Tabel 2.6 PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	17
Tabel 2.7 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017	22
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2017	23
Tabel 2.9 Indikator Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 –2017.....	23
Tabel 2.10 Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Penduduk Miskin	25
Tabel 2.11 Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2017	26
Tabel 2.12 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan	27
Tabel 2.13 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	29
Tabel 2.14 Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sampang	30
Tabel 2.15 Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan.....	31
Tabel 2.16 Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.....	31
Tabel 2.17 Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sampang	32
Tabel 2.18 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	33
Tabel 2.19 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	34
Tabel 2.20 Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan	34
Tabel 2.21 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan	35
Tabel 2.22 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	36
Tabel 2.23 Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	36
Tabel 2.24 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38
Tabel 2.25 Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	39
Tabel 2.26 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan	40
Tabel 2.27 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	40
Tabel 2.28 Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41
Tabel 2.29 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	42
Tabel 2.30 Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga	43
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Urusan Statistik	44
Tabel 2.32 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan	44



Tabel 2.33 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan	45
Tabel 2.34 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan	45
Tabel 2.35 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	47
Tabel 2.36 Indikator Kinerja Urusan Pertanian	48
Tabel 2.37 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	51
Tabel 2.38 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan.....	52
Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian	52
Tabel 2.40 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013-2016	53
Tabel 2.41 Ketersediaan Fasilitas Infrastruktur Tahun 2013-2016.....	53
Tabel 2.42 Kejadian Kriminalitas Tahun 2012-2016.....	54
Tabel 2.43 Realisasi Perijinan Tahun 2013-2017	55
Tabel 2.44 IPM Kabupaten Sampang Tahun 2012 – 2017	56
Tabel 2.45 Perkembangan Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Sampang.....	57
Tabel 2.46 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2017 Kabupaten Sampang	58
Tabel 2.47 Nilai SAKIP Kabupaten Sampang Tahun 2016-2017	99



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 Kondisi Umum Daerah	1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	6
2.1.1.3 Aspek Demografi	12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	16
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	16
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	25
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	25
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	47
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	52
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	52
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	53
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	54
2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia	55
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	57
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	84
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	84
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah	86
2.3.2.1 Pendidikan.....	86
2.3.2.2 Kesehatan.....	86
2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	89
2.3.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	89
2.3.2.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	90
2.3.2.6 Sosial	90
2.3.2.7 Tenaga Kerja.....	90
2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91
2.3.2.9 Pangan.....	91
2.3.2.10 Pertanahan	91
2.3.2.11 Lingkungan Hidup.....	92
2.3.2.12 Admistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92
2.3.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	92



2.3.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93
2.3.2.15	Perhubungan	93
2.3.2.16	Komunikasi dan Informatika.....	94
2.3.2.17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	94
2.3.2.18	Penanaman Modal.....	94
2.3.2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	95
2.3.2.20	Statistik	95
2.3.2.21	Kebudayaan	95
2.3.2.22	Perpustakaan dan Kearsipan	95
2.3.2.23	Kelautan dan Perikanan.....	96
2.3.2.24	Pariwisata	96
2.3.2.25	Pertanian	97
2.3.2.26	Perdagangan.....	97
2.3.2.27	Perindustrian	97
2.3.2.28	Perencanaan	98
2.3.2.29	Keuangan	98
2.3.2.30	Pengawasan.....	98
2.3.2.31	Kepegawaian.....	98
2.3.2.32	Sekretariat Daerah.....	99
2.3.2.33	Penanggulangan Bencana.....	100

